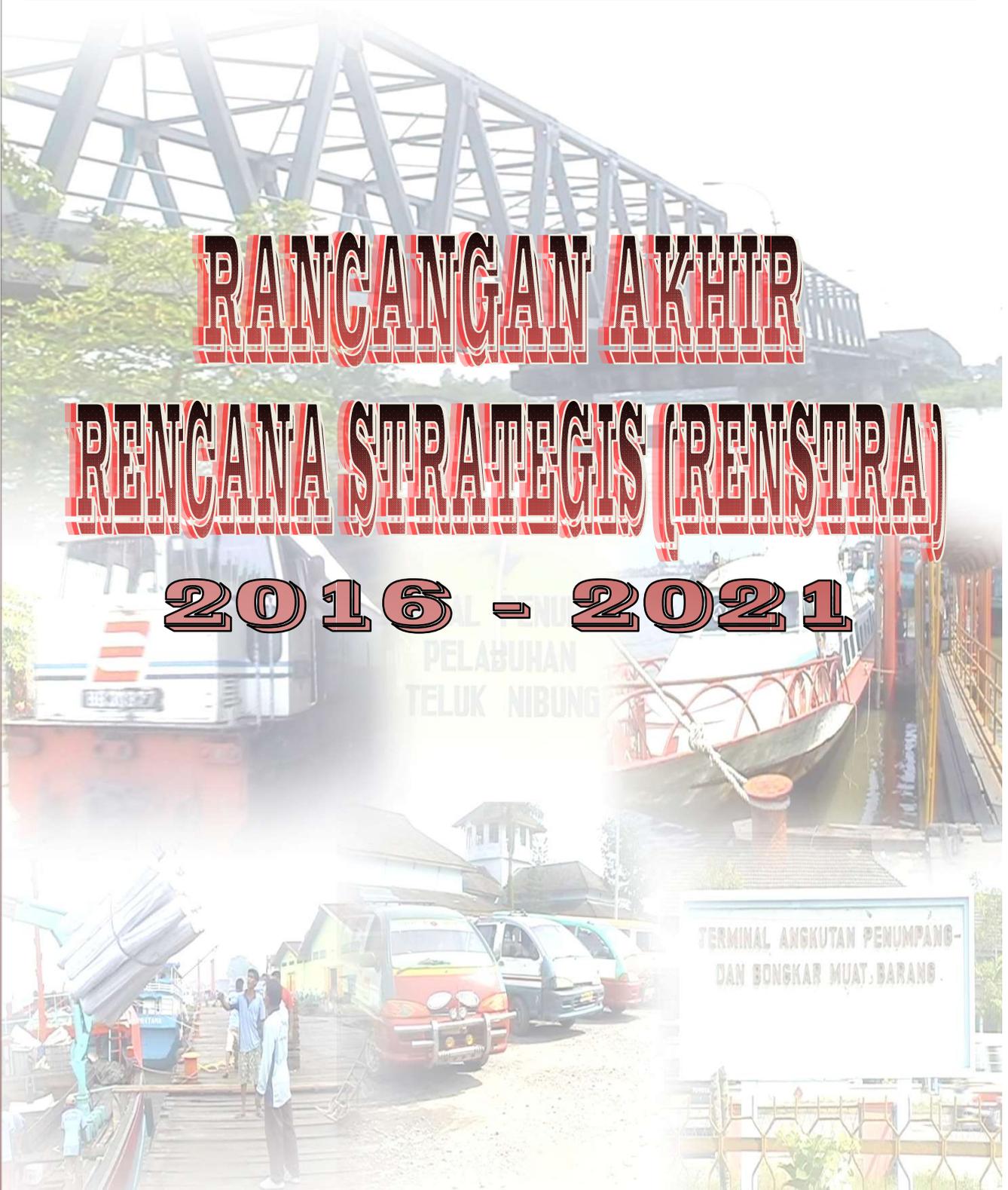


**PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI**

**RANCANGAN AKHIR**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

**2016 - 2021**



**DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANJUNGBALAI**

**Jln. Jend. Sudirman Km.7 Telp. (0623 7590080) Tanjungbalai**

**KATA  
PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, dimana penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai Tahun 2016 - 2021 dapat kami selesaikan.

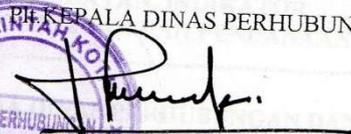
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai Tahun 2016 - 2021 ini disusun berdasarkan tuntutan umum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2016 – 2021, Rencana Strategis ini disusun diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kebijakan bagi Dinas Perhubungan dalam memberi pelayanan kepada masyarakat.

Berhasil tidaknya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai Tahun 2016 - 2021 sesuai dengan Visi dan Misi tidak tergantung kepada kinerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai saja, tetapi harus ada komitmen lintas sektoral dari seluruh pimpinan Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai baik lembaga Eksekutif maupun Legeslatif serta partisipasi dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat Kota Tanjungbalai.

Semoga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai Tahun 2016 - 2021 ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Tanjungbalai dan Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai maupun bagi masyarakat Kota Tanjungbalai.

Tanjungbalai, Januari 2017

PEMERINTAH KOTA  
DINAS PERHUBUNGAN



KHAIRUL, SH  
PEMBINA  
NIP. 19641231.198703.1.082





---

**DAFTAR ISI**


---

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang .....	I-2
1.2. Landasan Hukum .....	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	I-4
1.4. Sistematika Penulisan .....	I-5
<b>BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD .....</b>	<b>II-1</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD .....	II-2
2.2. Sumber Daya SKPD .....	II-3
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD .....	II-4
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD .....	II-5
	II-6
<b>BAB III : ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....</b>	<b>III-1</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD .....	III-2
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih ....	III-3
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Propinsi ....	III-4
3.4. Penentuan Isu – Isu Strategis .....	III-5
<b>BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN .....</b>	<b>IV-1</b>
4.1. Visi dan Misi Dinas Perhubungan .....	IV-1
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan ..	IV-2
4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan .....	IV-3
<b>BAB V : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .....</b>	<b>V-1</b>
<b>BAB VI : INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMINFO YANG MENGACU PADA TUJUAN, SASARAN RPJMD .....</b>	<b>VI-1</b>
<b>BABVII : PENUTUP.....</b>	<b>VII-1</b>

---

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

---

**1.1. Latar Belakang**

Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran transportasi sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan dimana pembangunan sektor transportasi diarahkan pada terwujudnya sistem transportasi wilayah yang handal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan mendukung mobilitas manusia, barang serta jasa, mendukung pola distribusi daerah serta mendukung pengembangan wilayah dan meningkatkan hubungan nasional yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara.

Untuk mewujudkan sistem transportasi di Kota Tanjungbalai yang handal dan berkemampuan tinggi dihadapkan pada berbagai tantangan, peluang dan kendala antara lain berupa perubahan lingkungan yang dinamis seperti otonomi daerah, terjadinya globalisasi ekonomi, perubahan perilaku permintaan jasa transportasi, kondisi politik, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta adanya keterbatasan sumber daya.

Dalam mengantisipasi kondisi tersebut diatas, Sistem Transportasi di Kota Tanjungbalai perlu disusun dan didukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga terwujud keandalan pelayanan dan keterpaduan antar dan intra moda transportasi yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi, tingkat kemajuan teknologi kebijakan tata ruang, pelestarian lingkungan dan kebijakan energi nasional sehingga akan selalu dapat memenuhi kebutuhan pembangunan, tuntutan masyarakat serta kebutuhan perdagangan regional, nasional dan internasional dengan memperhatikan kehandalan dan kelaikan sarana dan prasarana transportasi yang ada di Kota Tanjungbalai.

Oleh karena itu, melalui penyusunan Rencana Strategik (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai tahun 2016 s/d 2021, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam perencanaan transportasi yang terintegrasi secara kesisteman di Kota Tanjungbalai, penetapan prioritas pembangunan dan pengembangan sarana prasarana perhubungan secara berdaya guna dan berhasil guna ,sesuai permintaan yang berdasarkan realitas pola aktifitas, pola bangkitan -tarikan pergerakan ,sebaran pergerakan dan keunggulan komparatif antar zona dalam suatu wilayah, yang bersinergi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tanjungbalai.

**1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renstra**

Renstra Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai diselenggarakan berdasarkan atas :

1. Undang – Undang No.09 Drt.Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota – kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ;
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ;
3. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
4. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah ;
5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990, tentang Penyerahan sebagian Urusan pemerintah, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II ;
7. Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengolahan Keuangan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan ;
14. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Darat ;
15. Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tanjung Balai ;
16. Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungbalai.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategik Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai tahun 2016 - 2021 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan transportasi Daerah untuk jangka waktu 5 tahun ke depan, ditetapkan dengan maksud memberikan arah dan sekaligus menjadi acuan bagi

pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang bergerak di sektor transportasi di dalam upaya mewujudkan Sistem Transportasi Daerah dalam seluruh hirarkinya dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintahan Daerah Kota Tanjungbalai yang tertuang dalam RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan adalah:

- a. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam program dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi untuk 5 (lima) tahun kedepan, sehingga dapat terwujud sesuai tujuan dan sasaran, dan arah kebijakan transportasi yang telah ditetapkan.
- b. Mengidentifikasi potensi, sumber daya dan permasalahan pembangunan sektor transportasi, sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan, arah dan tujuan dan strategi pembangunan sektor transportasi di Sumatera Utara,
- c. Mengakomodir aspirasi yang berkembang baik dari lembaga pemerintah, asosiasi profesi, dan masyarakat umum, terkait pembangunan sektor transportasi di Kota Tanjungbalai

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai secara keseluruhan tersusun sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2. Sumber Daya SKPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

#### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

#### **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN**

- 4.1. Visi dan Misi Dinas Perhubungan
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan
- 4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan

**BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN, SASARAN RPJMD**

**BAB VII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD**

Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 03 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 16 Tahun 2018 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tanjungbalai. Pengaturan lebih lanjut berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Tugas, Pokok dan Fungsi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, bahwa Dinas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- I. Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dibidang perhubungan berdasarkan azas otonom dan tugas pembantuan;
- II. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan sebgaiian urusan pemerintahan dibidang perhubungan ;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan sebgaiian urusan pemerintahan dibidang perhubungan ;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (Eselon II.b), Kepala Dinas dibantu 5 (Lima) orang Pejabat Struktural Eselon III.a dan IV.b adapun susunan organisasinya sebagai berikut:

#### **A. Kepala Dinas**

- (1) Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan bidang Perhubungan berdasarkan atas asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan bidang Perhubungan;
  - b. pelaksanaan pelayanan umum bidang Perhubungan;
  - c. pengelolaan urusan ketatausahaan;
  - d. pemberian dukungan dan koordinasi dengan instansi Pelayanan Perizinan;

- e. penyusunan rencana kebijakan umum, operasional dan evaluasi di bidang Perhubungan;
  - f. pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan;
  - g. pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan;
  - h. penyelenggaraan unit pelaksanaan teknis di lingkungan dinas;
  - i. pelaksanaan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan kepala daerah;
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya;
  - k. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kota sesuai standar yang ditetapkan;
  - l. pelaksanaan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Daerah;
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, Kepala Dinas dibantu oleh :
- a. Sekretaris;
  - b. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ);
  - c. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut (LLAL);
  - d. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (LLASDP);
  - e. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD);
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **B. Sekretaris**

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi perencanaan, pengumpulan dan pengolahan data, Penelitian, pengembangan, dan pelaporan pembinaan, ketatausahaan, ketatalaksanaan hukum, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta pemberian pelayanan teknis dan administrasi, kepada Kepala Dinas dan semua unsur di lingkungan Dinas Perhubungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan hukum, rumah tangga, administrasi, perjalanan dinas, protokol dan hubungan masyarakat;
  - b. penyiapan analisa kebutuhan, pengadaan administrasi dan inventarisasi barang perlengkapan serta melakukan perawatan dan pemeliharaan;
  - c. penyiapan bahan petunjuk umum dan teknis di bidang kepegawaian serta memberikan pelayanan administratif kepegawaian;

- d. penyusunan anggaran keuangan, administrasi keuangan, pertanggungjawaban serta laporan keuangan;
  - e. Pengoordinasian penyusunan Rencana Strategi (renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
  - f. Pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  - g. Pengoordinasian pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pengendalian program, evaluasi dan pelaporan;
  - h. Pengoordinasian pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan dan pengumpulan data;
  - i. Penyipaan dan analisa data perencanaan dalam rangka penyusunan program kerja tahunan;
  - j. Penyiapan laporan kegiatan anggaran dan mengoordinasikan pertanggungjawaban pelaporan;
  - k. Pengendalian terhadap sarana dan prasarana perhubungan;
  - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
  - m. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, Sekretaris dibantu oleh :
- a. kepala sub bagian umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
  - b. kepala sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

**1. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas :**

- a. melaksanakan urusan ketatalaksanaan, hubungan masyarakat dan hukum;
- b. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengusulan, penyusunan, perumusan, penginventarisasian program kerja tahunan untuk dibahas dalam rencana pembangunan daerah;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga;
- e. menerima, membaca, mengagenda dan mendistribusikan surat masuk sesuai dengan tujuan surat;
- f. melaksanakan persiapan administrasi perjalanan dinas pegawai;

- g. melaksanakan pengendalian surat masuk sesuai dengan penataan kearsipan pola baru;
- h. meneliti konsep surat dan menyesuaikan dengan tata naskah yang berlaku;
- i. mempersiapkan dan menyusun rencana kegiatan dan mempersiapkan pelaksanaan kegiatannya;
- j. menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang dan perbekalan serta alat tulis kantor;
- k. menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
- l. menginventarisasikan barang-barang / perlengkapan asset pemerintah;
- a. melaksanakan urusan administrasi keuangan dan perlengkapan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban serta laporan keuangan;
- b. melaksanakan penyiapan dan melakukan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan dan peralatan kantor;
- c. melaksanakan persiapan usulan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk diproses lebih lanjut;
- d. melaksanakan penyusunan laporan bulanan;
- e. menginventarisasikan barang-barang/perengkapan asset pemerintah;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugasnya;
- g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Sekretaris sesuai standar yang ditetapkan.

**2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :**

- a. penyusunan Rencana Strategis (renstra), Rencana Kerja (Renja);
- b. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- c. Mengumpulkan bahan dan data untuk penyusunan Rencana Kerja;
- d. Mengolah bahan dan data yang telah dikumpulkan untuk penyusunan rencana kerja;
- e. Menyimpan data dan aplikasi;
- f. Menyajikan data secara intensif, aktual dan akurat;
- g. Melakukan penyusunan program perencanaan perhubungan;
- a. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan;
- b. Mengumpulkan bahan dan data hasil pelaksanaan setiap program kegiatan;
- c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- d. mengolah data hasil pelaksanaan setiap program kegiatan;
- e. menyajikan data hasil pelaksanaan setiap program kegiatan;
- f. mengevaluasi data hasil pelaksanaan program kegiatan;

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugasnya;
- h. melaporkan dan mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Sekretaris sesuai standar yang ditetapkan.

### **C. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan(LLAJ)**

- (1) Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam bidang LLAJ.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang LLAJ mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang LLAJ;
  - b. penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
  - c. pelayanan manajemen angkutan dan perkeretaapian didalam daerah kota;
  - d. pengawasan keselamatan lalu lintas dan angkutan didalam kota;
  - e. pengaturan pelayanan perparkiran;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
  - g. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, Kepala Bidang LLAJ dibantu oleh :
  - a. kepala seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ);
  - b. kepala seksi DALOP LLAJ.
  - c. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana LLAJ

#### **1. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas :**

- a. melakukan, pembinaan penyelenggaraan pengangkutan orang dan barang;
- b. menetapkan tarif angkutan kota kelas ekonomi;
- c. penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkut barang;
- d. memberikan analisa dan telaahan terhadap izin operasi usaha angkutan sewa;
- e. memberikan analisa dan telaahan terhadap penyelenggaraan angkutan darat dan perkeretaapian;
- f. menyusun rute trayek angkutan umum;
- g. melakukan penyusunan penataan jaringan trayek;
- h. melakukan pengelolaan dan penataan perparkiran;
- i. menyusun dan menetapkan kelas jalan dijalan kota;
- j. menyusun dan menetapkan Jaringan Transportasi Jalan (JTJ) dalam daerah Kota;

- k. memberikan rekomendasi Andalalin (analisa dampak lalu lintas) terhadap setiap pembangunan fisik pada badan jalan dan daerah milik jalan serta perkeretaapian;
- l. memberikan bimbingan, keselamatan, analisa daerah rawan kecelakaan dan program penanggulangan kecelakaan;
- m. membina dan mengawasi sekolah-sekolah mengemudi;
- n. melakukan koordinasi dengan instansi lain menyangkut permasalahan lalu lintas, angkutan j alan dan perkeretaapian;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan sesuai bidang tugasnya;
- p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan sesuai standar yang ditetapkan.

**2. Kepala seksi DALOP LLAJ mempunyai tugas :**

- a. Pengumpulan, Pengolahan data, penyusunan rencana dan program dibidang pengawasan dan operasional lalu lintas angkutan jalan;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap kondisi arus lalu lintas angkutan jalan secara intensif;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap perizinan angkutan orang/barang;
- d. melakukan pengaturan dan pengendalian lalu lintas secara intensif;
- e. melaksanakan pemeriksaan kendaraan dan penertiban kendaraan bermotor terhadap angkutan orang/barang;
- f. melakukan penyidikan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan;
- g. melakukan inventarisasi pelanggaran lalu lintas angkutan jalan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan sesuai bidang tugasnya;
- i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan sesuai standar yang ditetapkan.

**3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana LLAJ mempunyai tugas :**

- a. Pengumpulan, Pengolahan data, penyusunan rencana dan program dibidang Sarana dan Prasarana LLAJ;
- b. Melaksanakan inventarisasi secara berkala terhadap sarana dan prasarana LLAJ;
- c. Melaksanakan dan menyiapkan pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, pengawasan dan penghapusan fasilitas perlengkapan jalan;
- d. melakukan pengkajian dan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan dan perkeretaapian;

- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan sesuai bidang tugasnya;
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan sesuai standar yang ditetapkan.

#### **D. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut (LLAL)**

- (1) Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam bidang Lalu Lintas Angkutan Laut.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang Lalu Lintas Angkutan Laut;
  - f. pembinaan pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional angkutan laut di wilayah kota;
  - g. pembinaan pengendalian dan pengawasan kegiatan Lalu Lintas Angkutan Laut serta unsur penunjangnya dipelabuhan lokal/kota;
  - h. pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan penunjang keselamatan transportasi laut;
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
  - j. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut dibantu oleh :
  - d. Kepala seksi kepelabuhanan;
  - e. Kepala seksi keselamatan pelayaran;
  - f. Kepala Seksi Angkutan Laut

#### **1. Kepala Seksi Kepelabuhan mempunyai tugas :**

- a. memberikan analisa dan telaahan terhadap izin kerja angkutan laut;
- b. mengusulkan besarnya tarif jasa pelabuhan laut;
- c. merencanakan pembangunan pelabuhan laut;
- d. menyiapkan pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap pemenuhan persyaratan dan teknis pengoperasian pelabuhan laut;
- e. Mengelola administrasi dan menyelenggarakan pengoperasian pelabuhan laut;
- f. melaksanakan pemanduan dan penundaan angkutan laut;

- g. menyelenggarakan jasa kepelabuhan laut;
- h. memberikan rekomendasi tatanan kepelabuhan regional;
- i. mengawasi jasa pelabuhan regional;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut sesuai bidang tugasnya;
- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut sesuai standar yang ditetapkan.

**2. Kepala Seksi Angkutan mempunyai tugas :**

- a. Menyiapkan perencanaan penunjukan lokasi, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik serta pengendalian ketertiban pantai dan atau perairan daratan;
- b. melakukan penunjukan lokasi dan desain sarana dan prasarana angkutan laut;
- c. menyiapkan pemberian bimbingan izin angkutan laut;
- d. memberikan analisa dan telaahan terhadap izin usaha perusahaan pelayaran;
- e. memberikan analisa dan telaahan terhadap izin usaha penumpang angkutan laut (expedisi muatan kapal laut, perusahaan bongkar muat, jasa pengurusan transportasi, perusahaan tally, depo peti kemas/container dalam kota);
- f. memberikan analisa dan telaahan terhadap izin pembuatan tempat penimbunan kayu leg, pound, jaring terapung dan keramba di sungai;
- g. melaksanakan proses penerbitan surat tanda kebangsaan kapal berukuran isi kotor lebih kecil dari 7 GT;
- h. melaksanakan usul penetapan tarif angkutan laut penumpang kelas ekonomi dalam kota angkutan laut;
- i. mengawasi pengoperasian penyelenggaraan;
- j. mengadakan pemasangan dan pemeliharaan rambu angkutan laut;
- k. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang angkutan laut;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut sesuai bidang tugasnya;
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut sesuai standar yang ditetapkan.

**3. Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas :**

- a. melaksanakan penanggulangan pencemaran, patroli dan bantuan SAR di pantai;
- b. membina dan mengawasi penyelenggaraan angkutan laut;
- c. membina, pengendalian, pemeliharaan dan pengawasan terhadap alur pelayaran

- d. mengawasi pengukuran serta pendaftaran kapal berukuran isi kotor lebih dari 7 GT;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut sesuai bidang tugasnya;
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut sesuai standar yang ditetapkan.

#### **E. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (LLASDP)**

- (1) Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (LLASDP) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam bidang LLASDP.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang LLASDP mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang LLASDP;
  - b. menyusun dan menetapkan jaringan LLASDP;
  - c. penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas LLASDP;
  - d. pelayanan manajemen angkutan sungai didalam daerah kota;
  - e. merencanakan pengadaan pemasangan dan pemeliharaan rambu - rambu lalu lintas Angkutan Sungai, alat pengendali dan penggunaan pemakai sarana transportasi fasilitas pendukung lainnya pada LLASDP yang berada didalam Wilayah Kota;
  - f. pengawasan keselamatan lalu lintas dan angkutan Sungai didalam kota;
  - g. pengaturan pelayanan Tambatan Kapal di alur Sungai;
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
  - i. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan.
  - j. memberikan rekomendasi terhadap setiap pembangunan fisik lalu lintas sungai danau dan penyeberangan;
  - k. mengadakan pengendalian, pengawasan dan penertiban lalu lintas sungai danau dan penyeberangan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, Kepala Bidang LLASDP dibantu oleh :
  - a. kepala seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (LLASDP);
  - b. kepala seksi DALOP LLASDP.
  - c. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana LLASDP

**1. Kepala Seksi LLASDP Jalan mempunyai tugas :**

- a. melakukan, pembinaan penyelenggaraan Angkutan Sungai;
- b. menetapkan tarif angkutan Sungai kelas ekonomi di wilayah Kota;
- c. penetapan standar batas maksimum muatan dan berat Angkutan Sungai;
- d. memberikan analisa dan telaahan terhadap izin operasi usaha angkutan Sungai;
- e. memberikan analisa dan telaahan terhadap penyelenggaraan angkutan Sungai;
- f. menyusun rute trayek angkutan Sungai;
- g. melakukan penyusunan penataan jaringan trayek Angkutan Sungai;
- h. melakukan pengelolaan dan penataan Tambatan Kapal di sungai;
- i. memberikan bimbingan, keselamatan, angkutan Sungai
- j. membina, pengendalian, pemeliharaan dan pengawasan terhadap alur pelayaran serta pengerukan sungai;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang LLASDP sesuai bidang tugasnya;
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang LLASDP sesuai standar yang ditetapkan.

**2. Kepala seksi DALOP LLASDP mempunyai tugas :**

- a. Pengumpulan, Pengolahan data, penyusunan rencana dan program dibidang pengawasan dan operasional LLASDP;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap kondisi LLASDP jalan secara intensif;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap perizinan angkutan Sungai;
- d. melakukan pengaturan dan pengendalian LLASDP secara intensif;
- e. melaksanakan pemeriksaan terhadap angkutan Sungai;
- f. melakukan penyidikan terhadap pelanggran LLASDP;
- g. melakukan inventarisasi pelanggran LLASDP;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang LLASDP sesuai bidang tugasnya;
- i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang LLASDP sesuai standar yang ditetapkan.

**3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana LLASDP mempunyai tugas :**

- a. Pengumpulan, Pengolahan data, penyusunan rencana dan program dibidang Saran dan Prasarana LLASDP;
- b. Melaksanakan inventarisasi secara berkala terhadap sarana dan prasarana LLASDP;
- c. Melaksanakan dan menyiapkan pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, pengawasan dan penghapusan fasilitas perlengkapan LLASDP;

- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang LLASDP sesuai bidang tugasnya;
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang LLASDP sesuai standar yang ditetapkan.

**F. Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai Tugas :**

- a. Memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan kelaikan jalan kendaraan bermotor;
- b. Mengelola administrasi dan menyelenggarakan pengujian kendaraan bermotor;
- c. memelihara sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya;
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan.

**G. Kepala UPTD Terminal mempunyai Tugas :**

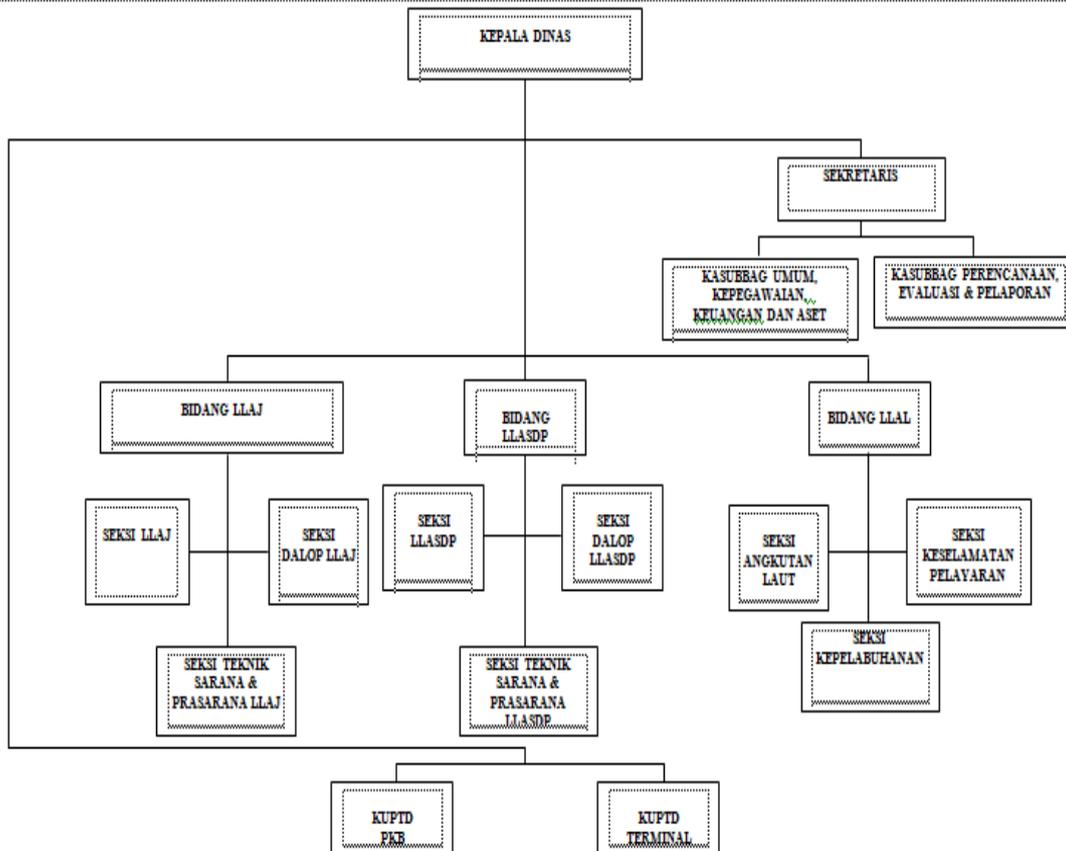
- a. melaksanakan pengelolaan terminal angkutan darat pada terminal induk dan terminal pembantu;
- b. mengelola administrasi dan manajemen operasional terminal angkutan darat;
- c. membina operasional angkutan dan pengawasan operasional terminal;
- d. memelihara sarana dan prasarana terminal;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya;
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan.

**H. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan**

1. Kepala
2. Sekretaris, terdiri dari :
  - a. sub bagian umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan
  - b. Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), terdiri dari :
  - a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - b. Seksi DALOP LLAJ.
  - c. Seksi Sarana dan Prasarana LLAJ
4. Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut, terdiri dari :
  - a. Seksi Kepelabuhan;
  - b. Seksi Angkutan Laut

- c. Seksi Keselamatan Pelayaran.
- 5. Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
- 6. Kepala UPTD Terminal

**Gambar I-1**  
**Bagan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai**



## 2.2 Sumber Daya SKPD

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Tanjungbalai pada tahun 2016 seluruhnya sebanyak 103 orang. Menurut jenjang pendidikan lebih dari 79% tamatan SLTA, sedangkan menurut status kepegawaian lebih dari 70% merupakan tenaga sukarela, dan hanya 13% dari seluruh pegawai yang ada memenuhi kualifikasi keahlian teknis sebagaimana yang tertulis dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2	1
2	Strata 1	16
3	Sarjana Muda/diploma 3	5
4	Diploma 2	0
5	SLTA/Sederajat	77
6	SLTP/Sederajat	3
7	SD	1
<b>Jumlah</b>		<b>103</b>

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	43
2	Tenaga Pembantu Ketertiban Lalu Lintas	60
<b>Jumlah</b>		<b>103</b>

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Kualifikasi Teknis

No.	Kualifikasi	Jumlah
1	PPNS	1
2	Pengujian Kendaraan Bermotor	1
3	Audit Keselamatan Lalu Lintas	1
4	Manajemen Lalu Lintas	2
5	Surveyor	2
6	Perencanaan Transportasi	2
7	Analisis Dampak Lalu Lintas	0
8	Pengelolaan Terminal	0
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>

### 2.2.2 Asset/Modal

Asset Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai yang merupakan barang tidak bergerak dan bergerak serta barang perlengkapan ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4 Asset Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai

No.	Asset	Jumlah Satuan	Keadaan
1	Perlengkapan Barang Bergerak ➤ Kendaraan Roda 4 ➤ Bus Sekolah ➤ Kendaraan Roda 2	4 unit 1 unit 17 unit	3 baik 1 rusak Baik 14 baik 3 rusak
2	Perlengkapan Barang Tudak Bergerak ➤ Tanah ➤ Bangunan	28.085 m <sup>2</sup> 2.157 m <sup>2</sup>	Baik baik
3	Perlengkapan Barang Elektronik ➤ Pesawat Telephone ➤ HT ➤ Komputer ➤ Laptop ➤ Printer	1 unit 25 uit 3 unit 9 unit 10 unit	Rusak ringan Baik 2 baik 1 rusak 7 baik 2 rusak 6 baik 4 rusak

4	Perlengkapan Kantor ➤ Meja ➤ Kursi	17 unit 78 unit	16 baik 1 rusak 73 baik 5 rusak
5	Perlengkapan Lalu lintas ➤ Alat Pemberi Isarat Lalu Lintas ➤ Warning Light ➤ Rambu Lalu Lintas ➤ Halte ➤ Guard Rail ➤ Patok Pengaman Lalu Lintas ➤ Water Box/Road Barrier	4 unit 13 unit 304 unit 9 unit 574 m	2 baik 2 sedang 6 baik 7 rusak 45 baik 259 rusak 5 baik 4 rusak 275 baik 299 rusak

### 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Sebagaimana Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan bidang Perhubungan berdasarkan atas asas otonomi dan tugas pembantuan, Pelayanan dan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan adalah pelayanan kepada masyarakat dibidang transportasi dan tugas-tugas pengkoordinasian baik kepada SKPD terkait di tingkat Pemerintahan Kota, Pemerintah Provinsi dan koordinasi ke Pemerintah Pusat maupun kepada lembaga-lembaga setingkat terkait dengan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan sesuai dengan fungsinya yaitu :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di bidang perhubungan;
- c. Penyusunan dan penetapan rencana teknis jaringan transportasi;
- d. Pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- e. Pengoperasian dan pemeliharaan terminal;
- f. Pemantauan dan pengawasan transportasi jalan dan kebandarudaraan;
- g. Pelaksanaan pengendalian dan ketertiban lalu lintas;
- h. Pengembangan dan pengelolaan perparkiran;
- i. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
- j. Pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang perhubungan;
- k. Pemberian dan pencabutan perijinan di bidang perhubungan;
- l. Pelaksanaan kegiatan bidang pemungutan retribusi;
- m. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- n. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- o. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);

- p. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- q. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perhubungan;
- r. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
- s. Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
- t. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- u. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan secara khusus memang belum terlihat jelas dikarenakan beberapa faktor diantaranya masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), dan masih kurangnya Pendanaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kota sehingga menghambat dalam kinerja pelayanan kepada masyarakat namun ada beberapa hal yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan fungsinya yaitu : pelaksanaan dan pengendalian lalu lintas didalam wilayah Kota yang berdampak terhadap kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas sehingga berkurangnya tingkat kemacetan lalu lintas khususnya di jalan raya dalam wilayah Kota Tanjungbalai, yang dilakukan bersama instansi terkait, selain melakukan kegiatan tersebut dan untuk menjalankan program Pemerintah Pusat maupun pemerintah Propinsi Sumatera Utara dibidang Transportasi yaitu mengurangi tingkat kecelakaan salah satunya adalah melakukan pelayanan Pengujian kendaraan bermotor kepada masyarakat yang berguna untuk mengurangi atau mencegah terjadinya kecelakaan di jalan, jumlah kendaraan yang melakukan pengujian Kendaraan bermotor untuk tahun 2015 adalah 40%.

Fungsi lain dari Dinas Perhubungan adalah dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Dinas Perhubungan memberikan pemasukan kepada Pemerintah Daerah melalui retribusi adapun capaian realisasi Pendapatan untuk tahun 2016 adalah (59,12%) dan untuk tahun 2017 target retribusi Dinas Perhubungan adalah **Rp. 257.200.000** dan terdiri dari 6 jenis Pungutan yaitu:

- a. Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum
- b. Retribusi Tempat Khusus Parkir
- c. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- d. Retribusi Terminal
- e. Retribusi Ijin Trayek
- f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan (Tambahan Kapal)

Langkah awal dalam pelaksanaan tugas pada tahun 2016 Dinas Perhubungan untuk mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah adalah penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan tahun 2016 – 2021 yang dapat memberikan arah dan pedomanan, tindakan yang akan dilaksanakan untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang dirumuskan dengan Visi dan Misi Dinas Perhubungan, dan keberhasilan Rencana Strategis ini sangat dipengaruhi oleh komitmen penuh para pelaksana tugas dilingkungan kerja Dinas Perhubungan sendiri dan juga instansi terkait lainnya melalui proses saling berkomunikasi dan berkoordinasi, guna mewujudkan terciptanya pelayanan transportasi yang efektif di Kota Tanjungbalai dalam arti aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, tarif terjangkau, tertib, teratur lancar dan cepat, selamat, aman, mudah, tepat waktu dan nyaman dan efisien dalam satu kesatuan jaringan pelayanan transportasi kepada masyarakat. Keseluruhan kinerja pelayanan Dinas Perhubungan yang telah tercapai Tahun 2011-2016 dirangkum pada Tabel 2.5 berikut ini:

Tabel 2.5 Kinerja Pelayanan



Kinerja pelayanan oleh SKPD selain dilihat dari indikator-indikator pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berkenaan, dapat juga dilihat dari rasio keterserapan pendanaan yang telah dianggarkan. Periode sebelumnya rata-rata realisasi anggaran pada Dinas Perhubungan dan Kominfo menunjukkan angka rasio yang cukup baik.

Rencana strategis ke depan akan sangat memperhatikan berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kinerja pelayanan kepada masyarakat dibidang transportasi. Upaya –upaya ini antara lain: peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur Dinas Perhubungan akan dilakukan setiap tahun dengan kegiatan peningkatan kemampuan teknis aparatur melalui pendidikan dan pelatihan dibidang perhubungan di luar daerah; meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan pusat dibidang Perhubungan guna mendapatkan pendanaan daerah pemerintah pusat.

Berbagai upaya ini diharapkan akan lebih dapat meningkatkan kinerja pendanaan dan pelayanan di Dinas Perhubungan pada tahun-tahun yang akan datang. Berikut disajikan tabel 2.6 yakni tentang rencana anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan di Dinas Perhubungan dan periode 2011-2016.

tabel 2.6 rencana anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan di Dinas  
Perhubungan

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Analisis Renstra Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai terhadap Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dan Renstra Kementerian Perhubungan selain ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran sesuai tugas dan fungsi juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi tingkat capaian kinerja yang telah dicapai oleh Renstra Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai apakah telah berkontribusi, telah melebihi/ sama/kurang terhadap pencapaian sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara maupun Renstra Kementerian Perhubungan. Selain itu hasil review ini akan menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan di Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai yang akan ditangani pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai periode berikutnya dan bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai. Review ini juga penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai dengan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dan Renstra Kementerian Perhubungan serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antar jenjang pemerintahan. Keseluruhan hasil review Renstra Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai terhadap Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dan Renstra Kementerian Perhubungan terangkum di dalam Tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3 Hasil komparasi Capaian dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai, Propinsi dan Kementerian

NO	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Dishub Kota Tanjungbalai	Capaian Sasaran Renstra Dishub Propinsi	Capaian Sasaran Renstra Kementerian
1	2	3	4	5
1	Jumlah Daerah Rawan Kemacetan	0 Titik	-	-
2	Rasio Izin Trayek	100%	-	-
3	Rasio Jumlah Kendaraan Bermotor Yang di uji Terhadap Wajib Uji	100%	-	-
4	Jumlah Pelabuhan Laut	2 Buah	-	-
5	Ketersediaan Halte	33 Buah	-	-
6	Jumlah Terminal Bus/Angkutan Penumpang	5 unit	-	-
7	Cakupan Pemasangan Rambu Lalu Lintas	1710 unit	-	-
8	Cakupan Marka Jalan	11900 meter	-	-
9	Pemasangan APILL	6 unit	-	-

10	Pemasangan warning Light	22 unit	-	-
11	Sumber Daya Manusia Perhubungan	26 orang	-	-

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai untuk lima tahun kedepan berdasarkan telaahan terhadap rencana tata ruang wilayah Kota Tanjungbalai, antara lain dari perwujudan sitem Kota Diwilayah Kota Tanjungbalai yang memberikan peluang sekaligus tantangan bagi pengembangan pelayanan perhubungan dengan ada rencana lanjutan sistem jaringan jalan yaitu pembangunan jalan lingkaran selatan dan utara untuk mendukung kawasan pelabuhan dan pembangunan kawasan industri juga memberikan tantangan dan peluang pada pelayanan Dinas Perhubungan selama lima tahun kedepan seperti penyiapan sarana perlengkapan lalu lintas, dan tantangan pengkajian potensi permasalahan dalam lingkup manajemen dan rekayasa lalu lintas dimasa yang akan datang. Perwujudan pola tata ruang juga memberi implikasi terhadap pengembangan pelayanan dibidang komunikasi antara lain diseminasi informasi tentang pemeliharaan lingkungan hidup, dan penyediaan sarana komunikasi dikawasan strategis.

Tabel 2.5 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Dinas	Target SPM	Target Renstra Tahun 2011 -2016					Realisasi Capaian Tahun 2011 - 2016					Rasio Capaian Pada Tahun %				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Jumlah Daerah Rawan Kemacetan.	Terse dia	16 Titik	14 Titik	12 Titik	10 Titik	8 Titik	20 Titik	16 Titik	15 Titik	12 Titik	8 Titik	80 %	93 %	80 %	83 %	100%
2.	Rasio Izin Trayek	Terse dia	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Rasio Jumlah Kendaraan Bermotor Yang di uji Terhadap Wajib Uji	Terse dia	70 %	80%	80 %	90 %	100 %	50%	60%	60%	70%	70%	71%	75%	75%	78%	70%
4.	Jumlah Pelabuhan Laut	Terse dia	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	50%	50%
5.	Ketersediaan Halte	Terse dia	5	7	9	11	13	4	7	9	10	13	80%	100%	100%	90%	100%
6.	Jumlah Terminal Bus/Angkutan Penumpang yang terpelihara	Terse dia	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Cakupan Pemasangan Rambu Lalu Lintas	Terse dia	80 Unit	110 Unit	130 Unit	170 Unit	250 Unit	70 Unit	90 Unit	110 Unit	150 Unit	210 Unit	88%	81%	84%	88%	84%
8.	Cakupan Marka Jalan, ,	Terse dia	3000 Meter	4000 Meter	5000 Meter	6000 Meter	7000 Meter	3000 Meter	4000 Meter	5000 Meter	5000 Meter	3900 Meter	100%	100%	100%	83%	56%
9.	Pemasangan APILL	Terse dia	-	-	-	3	4	-	-	-	3	4	0%	0%	0%	100%	100%
10.	Pemasangan	Terse	6	10	12	14	16	6	8	10	12	14	100%	80%	80%	85%	87%

	warning Light	dia	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit					
11.	Sumber Daya Manusia Perhubungan	Terse dia	6 Ora ng	11 Oran g	16 Ora ng	20 Ora ng	25 Oran g	4 Oran g	8 Oran g	10 Orang	15 Orang	19 Orang	66%	73%	63%	75%	95%

Tabel 2.6 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke- (Juta)					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- (Juta)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<b>Pendapatan</b>	1.902.750	1.902.750	1.952.750	2.430.605	2.430.605	1.415.000	1.513.126	1.390.198	1.276.694	311.330	74%	79%	71%	52%	13%
Pendapatan Asli Daerah	1.902.750	1.902.750	1.952.750	2.430.605	2.430.605	1.415.000	1.513.126	1.390.198	1.276.694	311.330	74%	79%	71%	52%	13%
- Hasil Retribusi Daerah	1.902.750	1.902.750	1.952.750	2.430.605	2.430.605	1.415.000	1.513.126	1.390.198	1.276.694	311.330	74%	79%	71%	52%	13%
<b>Belanja</b>															
<b>A. Belanja Tidak Langsung</b>	2.916.349	2.951.719	3.136.624	2.880.757	3.004.064	2.683.990	2.792.561	2.798.047	2.603.127	2.798.807	92%	94%	89%	90%	93%
<b>B. Belanja Langsung</b>	1.614.575	1.894.510	2.379.545	4.317.523	4.290.232	1.531.832	1.624.256	2.082.569	2.899.121	3.896.581	94%	85%	87%	67%	90%

### **BAB III**

## **ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Analisis isu – isu strategis dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi obyektif dan perkembangan yang terjadi di Kota Tanjungbalai selama pelaksanaan pembangunan lima tahun terakhir serta merupakan dasar utama Visi dan Misi rencana strategis dinas yang juga akan menentukan kinerja Dinas Perhubungan selama lima tahun mendatang.

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD**

Identifikasi permasalahan merupakan bagian penting dan langkah awal yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian untuk menjalankan amanat masyarakat dan lingkungan merupakan hal yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus dikedepankan di dalam perencanaan karena dampaknya yang nyata bagi SKPD di masa yang akan datang. Kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis bila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis dapat diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal yakni berupa kondisi yang mampu menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD lima tahun mendatang.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi. Berdasarkan hasil-hasil analisis di atas maka permasalahan yang terdapat pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai selama kurun waktu 2011 sampai tahun 2015 adalah berikut:

- a. Masih Kurangnya Kualitas dan Kuantitas SDM Dibidang Perhubungan ;
- b. Masih Kurangnya Pengawasan, Pengelolaan dan Pelayanan Keselamatan Lalu Lintas sehingga masih banyaknya Kendaraan Plat Hitam (tanpa Izin ) sebagai angkutan umum dan Masih Kurangnya Kesadaran Masyarakat Dalam hal Berlalu Lintas;
- c. Pelayanan Keselamatan,Keamanan dan Kenyamanan Pengguna Jalan masih belum optimal seperti Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Belum Optimal, Penggunaan Angkutan

Umum masih Angkutan Kecil, Masih rendahnya fasilitas kelengkapan Jalan, dan Pengujian Kendaraan Bermotor belum menggunakan Alat pengujian mekanis;

- d. Terminal belum berfungsi sejara optimal sehingga menyebabkan pengguna pelayanan terminal terhadap;
- e. Masih kurangnya Pelayanan, Kenyamanan dan Keselamatan Transportasi Sungai dan Laut;
- f. Masih kurangnya Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan pemanfaatan teknologi untuk pelayanan kepada masyarakat;

permasalahan yang terdapat pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai adalah tertera pada Tabel 3.1 berikut:

**Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai**

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Gambaran Pelayanan SKPD</b>	1. Realisasi perumusan kebijakanteknis dinas dibidang perhubungan belum optimal 2. Realisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan belum optimal 3. Realisasi pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dibidang perhubungan belum optimal	LAKIP	1. Realisasi penganggaran tidak sesuai dengan kebutuhan  2. Terbatasnya SDM yang berkualifikasi teknis	1. Pengaturan alokasi anggaran diluar kewenangan	1. Belum optimalnya kualitas pelayanan dibidang perhubungan  2. Belum memadainya ketersediaan dokumen perencanaan dan pengendalian transportasi  3. Belum memadainya cakupan infrastruktur transportasi  4. Belum optimalnya pembinaan angkutan keselamatan lalu lintas dan regulasi
<b>Kajian terhadap Renstra</b>	Belum berfungsi secara optimal	Renstra	Sasaran capaian kinerja		Masih kurangnya koordinasi

Dishub Provinsi Sumatera Utara			Renstra Dishub Kota Tanjungbalai terhadap Renstra dishubsu		dengan Dishubsu dalam pengembangan transportasi
- <b>Kajian terhadap Renstra Kementerian Perhubungan</b>	Belum berfungsi secara optimal	Renstra	Sasaran capaian kinerja Renstra Bappeda Kota Tanjungbalai terhadap Renstra Kementerian Perhubungan		Masih kurangnya koordinasi dengan kementerian dalam pengembangan transportasi

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

Visi, Misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Tanjungbalai tahun 2016 – 2021 terpilih adalah ***“Mewujudkan Kota Tanjungbalai yang Berprestasi, Religius, Sejahtera, Indah dan Harmonis”***. Ditinjaulanjuti dengan pernyataan lima misi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima;
- b. Mewujudkan kehidupan umat beragama menuju masyarakat yang religius dan berakhlak mulia;
- c. Meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi ekonomi unggulan serta daya saing dalam rangka mendorong kemandirian menuju masyarakat maju dan sejahtera;
- d. Mewujudkan sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan yang berkualitas berbasis IPTEK dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
- e. Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi dengan dukungan infrastruktur yang baik;
- f. Membina kehidupan sosial politik masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis dalam keanekaragaman suku dan agama yang berpegang pada adat dan budaya;
- g. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan tatanan kehidupan sosial masyarakat melalui pengutan peran keluarga.

Strategi untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut :

1. Strategi yang dipilih untuk pencapaian misi pertama adalah :
  - Meningkatkan cakupan layanan di berbagai bidang pembangunan dan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik;
  - Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui peningkatan kinerja pegawai;
  - Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
  - Mewujudkan partisipasi masyarakat dan kerjasama pemerintah dengan dunia usaha/pihak swasta untuk bersinergi dalam mengisi pemba-ngunan.
2. Strategi yang dipilih untuk pencapaian misi kedua adalah:
  - Mengembangkan kegiatan orientasi dan pembinaan keimanan dan ketaqwaan secara terus menerus kepada seluruh lapisan masyarakat dan aparatur di setiap kegiatan yang memungkinkan;
  - Menguatkan peran pemuka agama dan guru-guru pengajian dalam mengembangkan nilai dan norma agama dimulai dari usia dini.
3. Strategi yang dipilih untuk pencapaian misi ketiga adalah:
  - Meningkatkan sarana dan prasarana produksi dan bantuan permodalan di sektor perikanan dan kelautan, pertanian dan peternakan, perdagangan dan perindustrian, koperasi, UKM dan UMKM serta pariwisata;
  - Mengembangkan koperasi dan lembaga keuangan mikro;
  - Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan pelaku usaha dan daya saing ketenaga kerjaan.
4. Strategi yang dipilih untuk pencapaian misi keempat adalah:
  - Menata sistem dan manajemen layanan pendidikan yang efektif dan efisien berbasis daring (dalam jaringan);
  - Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
  - Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
  - Menata sistem regulasi dan standar layanan kesehatan;
  - Meningkatkan kualitas cakupan layanan kesehatan;
  - Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dan daya saing tenaga layanan kesehatan.
5. Strategi yang dipilih untuk pencapaian misi kelima adalah:
  - Pengembangan dan perbaikan infrastruktur serta sarana/prasarana perkotaan;
  - Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

6. Strategi yang dipilih untuk pencapaian misi keenam adalah:
  - Pengembangan kerukunan dan sikap toleransi serta solidaritas antar kelompok masyarakat;
  - Peningkatan keamanan dan ketertiban umum;
  - Pengembangan seni dan budaya lokal.
7. Strategi yang dipilih untuk pencapaian misi ketujuh adalah:
  - Peningkatan keberdayaan masyarakat;
  - Peningkatan kesejahteraan keluarga.

Dari pernyataan misi kepala daerah tersebut, yang berkaitan dengan bidang perhubungan dan kominfo adalah misi ke 1 dan ke 5 khususnya dalam mewujudkan program pembangunan infrastruktur, dan peningkatan cakupan layanan di berbagai bidang pembangunan dan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Hasil identifikasi SKPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi bahan masukan bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD. Dengan demikian isu-isu yang dirumuskan selain berdasarkan kepada tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan juga sudah berdasarkan pada kebutuhan pengelolaan faktor-faktor yang berkontribusi kepada pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perhubungan dan Kominfo terhadap pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih terangkum pada Tabel 3.2 berikut ini:

**Tabel 3.2**  
**Faktor penghambat dan Pendorong Pelayanan Dishub**  
**Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

<i>Visi: Mewujudkan Kota Tanjungbalai yang Berprestasi,Religius,Sejahtera,Indah dan Harmonis</i>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Dishub	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good govermance) untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan dokumen-dokumen perencanaan dibidang transportasi yang masih kurang</li> <li>- Manajemen SDM belum mengarah kepada peningkatan kinerja pegawai.</li> <li>- Ketersediaan anggaran relatif terbatas.</li> <li>- Masih kurangnya sarana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan yang dilakukan masih menuju kepeningkatan PAD</li> <li>- Belum adanya kebijakan nasional yang jelas yang menilai kinerja pegawai dan mengkaitkannya dengan kinerja</li> </ul>	Kebijakan Nasional yang mendukung.

		pendukung untuk keperluan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	SKPD. - Keterbatasan dana daerah secara keseluruhan. Keterbatasan sarana dan prasarana	
2.	Mewujudkan kehidupan umat beragama menuju masyarakat yang religius dan berakhlak mulia;	-	-	-
3.	Meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi ekonomi unggulan serta daya saing dalam rangka mendorong kemandirian menuju masyarakat maju dan sejahtera	-	-	-
4.	Mewujudkan sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan yang berkualitas berbasis IPTEK dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat;	- Masih rendahnya Kemampuan teknis aparatur Perhubungan	- Rendahnya minat aparatur untuk mengikuti Diklat-diklat Teknis Perhubungan Terbatasnya dana untuk mengikuti diklat teknis - Keterbatasan SDM di bidang Perhubungan	- Sumberdaya aparatur yang potensial
5.	Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi dengan dukungan infrastruktur yang baik	Melakukan penelitian dibidang transportasi yang berwawasan lingkungan dengan mengacu dengan program kemnetrian Perhubungan	- Kurangnya koordinas pemerintah daerah ke pemerintah pusat dibidang perhubungan - Masih kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dalam melakukan penelitian	
6.	Membina kehidupan sosial politik masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis dalam keanekaragaman suku dan agama yang berpegang pada adat dan budaya	-	-	-
7.	Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan tatanan kehidupan sosial masyarakat melalui pengutan peran keluarga.	-	-	-

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Utara

#### 3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan 2015 – 2019

Visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh renstra kementerian perhubungan tahun 2015 – 2019 adalah “ *Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah* “ Ditindaklanjuti dengan pernyataan misi:

1. Peningkatan pelayanan jasa transportasi untuk mewujudkan konektivitas nasional;
2. Peningkatan penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK dalam rangka pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan;
3. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dan restrukturisasi/reformasi kelembagaan dan regulasi.

Adapun tujuannya adalah mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien yang didukung transportasi yang berkompeten guna mendukung perwujudan Indonesia yang lebih sejahtera, sejalan dengan perwujudan Indonesia yang aman dan damai serta adil dan demokratis. Penyelenggaraan kegiatan transportasi yang efektif berkaitan dengan ketersediaan aksesibilitas, optimalisasi kapasitas, maksimalisasi kualitas serta keterjangkauan dalam pelayanan, sedangkan penyelenggaraan transportasi yang efisien berkaitan dengan kemampuan pengembangan dan penerapan teknologi transportasi serta peningkatan kualitas SDM transportasi yang berdampak kepada maksimalisasi daya guna dan minimasi biaya yang menjadi beban masyarakat, dengan sasaran pembangunan transportasi nasional tahun 2015 – 2019 adalah :

1. Terwujudnya pertumbuhan sektor transportasi yang berkesinambungan;
2. Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pelayanan jasa transportasi ke seluruh pelosok tanah air;
3. Terwujudnya keselamatan, keamanan dan keandalan seluruh moda transportasi sesuai standar pelayanan minimal;
4. Terwujudnya profesionalisme SDM transportasi dan melanjutkan pelaksanaan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi;
5. Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan.

Strategi untuk mendukung terwujudnya visi, misi tersebut adalah:

1. Perencanaan terpadu antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;
2. Pelibatan pemerintah daerah/BUMN/swasta;
3. Mengutamakan aspek keselamatan, keamanan, dan kehandalan;
4. Kompetensi dan profesional sumber daya manusia;
5. Mengutamakan aspek kelestarian lingkungan.

Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan tahun 2015 – 2019 dimaksudkan untuk mengemukakan faktor-faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dishub ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian. Selanjutnya berdasarkan analisis dan telaahan capaian sasaran Renstra Dishub terhadap Renstra Kementerian Perhubungan dapat disimpulkan permasalahan pelayanan di Dishub Kota Tanjungbalai sekaligus uraian faktor-faktor yang menjadi penghambat ataupun pendorong bagi pencapaian sasaran Renstra Kementerian Perhubungan yakni seperti yang tertuang pada Tabel 3.3 berikut ini:

**Tabel 3.3**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perhubungan**  
**Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Perhubungan	Permasalahan Pelayanan Dishub Kota Tanjungbalai	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya pertumbuhan sektor transportasi yang berkesinambungan</li> <li>2. Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pelayanan jasa transportasi keseluruhan pelosok tanah air</li> <li>3. Terwujudnya keselamatan, keamanan, dan keandalan seluruh moda transportasi sesuai SPM</li> <li>4. Terwujudnya profesionalisme SDM transportasi dan melanjutkan pelaksanaan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi</li> <li>5. Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih Kurangnya Peraturan Daerah yang mengatur Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;</li> <li>2. Tidak jelasnya kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kota</li> <li>3. Masih kurangnya atau kurang ketatnya pengawasan terhadap pengujian kendaraan bermotor</li> <li>4. Masih kurangnya penelitian untuk kebutuhan angkutan</li> <li>5. Kurangnya Disiplin masyarakat dalam berlalu lintas</li> <li>6. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas dan kurangnya teknologo dibidang transportasi yang ramah lingkungan</li> <li>7. Kurangnya wilayah untuk pengembangan angkutan massal</li> <li>8. Tidak sesuai perkembangan antara sarana dan prasarana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya SDM dibidang Perhubungan untuk membuat suatu Peraturan Daerah sehingga menghambat dalam Penegakan hukum di Daerah</li> <li>2. Belum adanya kelas jalan yang tetap dan kurang patuhnya kesadaran masyarakat dalam disiplin berlalu lintas</li> <li>3. Belum adanya alat pengujian kendaraan bermotor</li> <li>4. Kegiatan masih mengandalkan peningka yn PAD</li> <li>5. Masih krangnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Diklat – Diklat Teknis Dibidang Perhubungan yang dibiaya oleh pemerintah pusat</li> <li>2. Pembekalan PPNS tiap tahun yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat</li> <li>3. Adanya bantuan APBN untuk Pengadaan Alat PKB</li> <li>4. Adanya Program Pemerintah Pusat untuk meningkatkan Angkutan Printis</li> <li>5. Kebijakan – kebijakn yang</li> </ol>

	transportasi		
	9. Masih kurangnya SDM yang berkualifikasi dibidang perhubungan	6. Pengembangan transportasi yang berwawasan lingkungan yang masih sedikit	6. Kebijakan – kebijakn yang mendukung
	10. Belum adanya peraturan daerah dalm pembentukan masterplan transporatsi secara khusus	7. Wilayah yang kecil sehingga tidak bisa diterapkan angkutan massal	7. Dukungan dari pemerintah pusat untuk program angkutan massal
	11. Belum adanya penelitian yang dilakukan untuk mendukung keterpaduan sistem transportasi perkotaan	8. Masih kurangnya anggaran untuk pengembangan prasarana transportasi	8. Kebijakan – kebijakn yang mendukung
	12. Belum adanya SDM yang menguasai teknologi untuk mengembangkan energi Alternatif	9. Masih kurangnya pendanaan untuk biaya – biaya diklat teknis	9. Kebijakan – kebijakn yang mendukung
		10. Masih kurangnya penelitian – penelitian dibidang transporatsi	10. Kebijakan – kebijakn yang mendukung
		11. Kurangnya anggaran pemerintah daerah dalam melakukan penelitian transportasi	11. Kebijakan – kebijakn yang mendukung
		12. Perlu adanya penelitian ditingkat pusat yang lebih dalam	12. Kebijakan – kebijakn yang mendukung

### 3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Utara

Visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh renstra Perhubungan Propinsi Sumatera Utara adalah “*Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Transportasi Yang Terintegrasi, Efisien Dan Berwawasan Lingkungan Untuk Mendorong Daya Saing Wilayah* “ Ditindaklanjuti dengan pernyataan misi:

1. Mendorong peningkatan kualitas SDM perhubungan yang memiliki integritas dan professional (*Skills Developmet*)
2. Mendorong konektivitas intra dan antar moda transportasi (*transport connectivity*)
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi wilayah yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi (*Transportation Infrastructure Development*)
4. Mendorong partisipasi swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi (*Public Private Partnership*)
5. Mendorong pengembangan sistem transportasi ramah lingkungan (*Enviromentally sustainable transportation*)

berdasarkan analisis dan telaahan capaian sasaran Renstra Dishubkominfo terhadap Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Utara dapat disimpulkan permasalahan pelayanan di Dishubkominfo Kota Tanjungbalai sekaligus uraian faktor-faktor yang menjadi penghambat ataupun pendorong bagi pencapaian sasaran Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Utara yakni seperti yang tertuang pada Tabel 3.4 berikut ini:

**Tabel 3.4**  
**Permasalahan Pelayanan Dishub Kota Tanjungbalai Berdasarkan Sasaran Renstra Dishub Provinsi Sumatera Utara**  
**Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dishub Provinsi Sumatera Utara	Permasalahan Pelayanan Dishubkominfo Kota Tanjungbalai	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatnya pemerataan pelayanan umum di bidang perhubungan dengan prioritas pada wilayah kepulauan, wilayah yang terlambat perkembangannya, wilayah potensial dan wilayah yang perkembangannya cukup dinamis,</li> <li>2) Meningkatnya pelayanan angkutan umum yang murah, aman, nyaman, mudah, dan cepat, dengan meningkatkan manajemen sistem pelayanan angkutan umum yang hirarkhis dan integrated,</li> <li>3) Terciptanya pengembangan pelayanan angkutan umum massal pada wilayah perkotaan yang terintegrasi baik antar maupun intermoda,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak jelasnya kewenangan antara pemerintah propinsi dan pemerintah Kota</li> <li>2. Kurangnya wilayah untuk pengembangan angkutan massal</li> <li>3. Tidak sesuai nya perkembangan antara sarana dan prasarana transportasi</li> <li>4. Masih kurangnya SDM yang berkualifikasi dibidang perhubunga</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembekalan PPNS tiap tahun yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat</li> <li>2. Wilayah yang kecil sehingga tidak bisa diterapkan angkutan massal</li> <li>3. Masih kurangnya anggaran untuk pengembangan prasarana transportasi</li> <li>4. Masih kurangnya pendanaan untuk biaya – biaya diklat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya kelas jalan yang tetap dan kurang patuhnya kesadaran masyarakat dalam disiplin berlalu lintas</li> <li>2. Dukungan dari pemerintah pusat untuk program angkutan massal</li> <li>3. Kebijakan – kebijakn yang mendukung</li> <li>4. Kebijakan – kebijakn yang</li> </ol>

<p>sehingga mampu mengurangi kepadatan lalu lintas,</p> <p>4) Meningkatnya pelayanan Transportasi yang lebih merata, termasuk ke wilayah perdesaan dan wilayah kepulauan,</p> <p>Meningkatnya kualitas manajemen Transportasi dengan penekanan pada peningkatan kualitas SDM, prasarana dan sarana, pemanfaatan sistem informasi yang efektif dan efisien serta koordinasi dan sinkronisasi lintas stake holders.</p>		teknis	mendukung
---	--	--------	-----------

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Pengembangan wilayah Kota Tanjungbalai berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungbalai 2013 – 2033 diarahkan menuju:

1. Peningkatan fungsi pusat pelayanan kota, meliputi :
  - a. menetapkan pusat pelayanan kota yang berhirarki;
  - b. meningkatkan aksesibilitas antara pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanankota dan pusat lingkungan; dan
  - c. mendorong pembangunan dan pengembangan pusat-pusat lingkungan.
2. Pengembangan sarana dan prasarana kota, meliputi :
  - a. meningkatkan kualitas, jangkauan dan keterpaduan sistem jaringantransportasi;
  - b. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi;
  - c. meningkatkan sistem jaringan energi/kelistrikan;
  - d. mengembangkan sistem jaringan prasarana sumber daya air, seperti : jaringan air baku dan pengendalian intalasi air limbah; dan
  - e. mengembangkan jaringan infrastruktur perkotaan.
3. Strategi penetapan dan pengelolaan kawasan lindung, meliputi :
  - a. meningkatkan nilai konservasi pada kawasan lindung;
  - b. merehabilitasi kawasan lindung yang telah berubah fungsi; dan
  - c. meningkatkan peran masyarakat dalam kelestarian kawasan lindung.
4. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau minimal 30 % dari luas wilayah kota, meliputi :
  - a. mempertahankan fungsi dan menata Ruang Terbuka Hijau yang sudah ada;
  - b. mengembalikan Ruang Terbuka Hijau yang beralih fungsi;
  - c. menyediakan taman-taman lingkungan yang berada di pusat-pusat lingkungan; dan
  - a. mengembangkan kerjasama dengan swasta dalam menyediakan Ruang Terbuka Hijau.

5. Strategi pengembangan kawasan budidaya, meliputi :
  - b. mengembangkan kawasan budidaya yang bernilai ekonomi tinggi;
  - c. menetapkan kawasan budidaya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  - d. mengatur, menata dan mengendalikan pengembangan kawasan budidaya atau sesuai peruntukkan; dan
  - e. mengendalikan perkembangan kawasan terbangun pada wilayah yang berkepadatan tinggi.
6. Penataan dan pengelolaan ruang untuk sektif informal, meliputi :
  - a. mengelola kegiatan pedagang kaki lima; dan
  - b. menyediakan ruang untuk sektor informal untuk mendukung usaha industri rumah tangga/kecil.
7. Penetapan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya, dan hankam, meliputi :
  - a. menetapkan kawasan pusat pelayanan kota sebagai pusat perdagangan dan jasa;
  - b. menata kawasan pelabuhan dan pergudangan untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa;
  - c. memelihara, melestarikan dan merevitalisasi kawasan bangunan bersejarah;
  - d. menjaga dan meningkatkan fungsi aksesibilitas yang menghubungkan jalanarteri dengan kawasan LANAL; dan
  - e. turut serta menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan TNI-AL;
8. Pengembangan dan peningkatan kawasan industri, meliputi :
  - a. menetapkan kawasan peruntukan industri sebagai pusat perdagangan dan jasa;
  - b. mengembangkan kawasan peruntukan industri yang dilengkapi fasilitas atau prasarana minimum; dan
  - c. mengarahkan kegiatan kawasan peruntukan industri untuk wilayah regional.
9. Pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana, meliputi :
  - a. menetapkan jalur evakuasi bencana; dan
  - b. menetapkan ruang evakuasi bencana.
10. Pengembangan wilayah beserta sarana dan prasarana umum lainnya bernuansa religius, meliputi:
  - a. mengembangkan sarana peribadatan terintegrasi dengan fasilitas umum serta jaringan transportasi umum;
  - b. mengembangkan kawasan peribadatan sesuai dengan distribusi kependudukan Kota Tanjungbalai; dan
  - c. mengembangkan peraturan zonasi sesuai dengan nilai-nilai religius masyarakat.

11. Peningkatan fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara, meliputi:
  - a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
  - b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan disekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
  - c. mengambangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun disekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang
  - d. memisahkan kawasan strategis nasional dengan budi daya terbangun; dan
  - e. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset Pertahanan/TNI.

Tujuan penataan ruang wilayah Kota Tanjungbalai adalah mencerminkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar kecamatan, dan antar pemangku kepentingan. Di masa yang akan datang tujuan penataan ruang Kota Tanjungbalai tidak akan terlepas dari peran, fungsi, dan kedudukannya dalam lingkup wilayah yang lebih luas. Untuk mendukung pengembangan peran dan fungsi Kota Tanjungbalai sebagai salah satu pengembangan pelabuhan nasional di Provinsi Sumatera Utara. Rencana struktur ruang wilayah Kota Tanjungbalai salah satu adalah rencana sistem prasarana kota yang terdiri dari Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi.

Sistem Transportasi merupakan persyaratan untuk mendukung percepatan pembangunan. Transportasi juga merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam mempelancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan. Bila ditinjau dari Kota Tanjungbalai seperti pengembangan kawasan strategis maupun kawasan cepat tumbuh, maka diperlukan suatu pengembangan sistem transportasi yang berguna untuk pengembangan jaringan pelayanan prasarana wilayah dan membuka terisolasinya wilayah strategis dan mewujudkan sinergi yang saling menguntungkan sistem prasarana wilayah Kota Tanjungbalai. Disamping itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan dan hasil pembangunan.

Sistem jaringan transportasi dalam RTRW Kota Tanjungbalai terdiri dari sistem jaringan transportasi Jalan, sistem jaringan perkeretaapian dan sistem jaringan transportasi sungai.

#### **A. Rencana Jaringan Jalan**

- Penataan jaringan jalan di Kawasan Pusat Kota merupakan bagian yang utuh dari sistem aksesibilitas dan jaringan jalan regional (Tanjungbalai – Medan dan Tanjungbalai – Rantauprapat),

- Dalam penataan jaringan jalan termasuk didalamnya adalah penataan pedestrian dan jalur hijau,
- Pengembangan jaringan jalan perlu mempertimbangkan hirarki yang jelas untuk menunjukkan struktur kota,
- Terdapat korelasi antara hirarki jalan dengan tingkat intensitas bangunan dan sifat kegiatannya,
- Perlu pertimbangan dalam menentukan kelas hirarki jalan mengingat jalan dengan hirarki tinggi akan memberikan pengaruh pada tingkat aksesibilitas kawasan yang kemudian akan mendorong perubahan peruntukan lahan,
- Jaringan jalan dan hirarkinya dapat menjadi pembatas maupun penghubung kawasan.

Beberapa rencana pengembangan jaringan jalan di Kota Tanjungbalai sampai tahun 2033 meliputi :

- a. Peningkatan Kualitas jalan menjadi jaringan jalan arteri primer;
  - b. Peningkatan kualitas jalan menjadi jaringan jalan arteri sekunder;
  - c. Peningkatan kualitas jalan menjadi jaringan jalan kolektor primer;
- a. Peningkatan dan pengembangan jaringan jalan lokal primer dan jaringan jalan lingkungan yang merupakan jalan penghubung antar persil dalam kawasan perkotaan.
  - b. Rencana pengembangan ruas jaringan jalan baru di wilayah Kota Tanjungbalai meliputi ;
    - Pengembangan ruas jalan lingkaran utara;
    - Pengembangan ruas jalan lingkaran selatan.

#### **B. Rencana Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Angkutan Umum**

Secara umum tingkat pelayanan angkutan umum baik moda angkutan maupun rute/trayek angkutan di Kota Tanjungbalai masih sangat rendah. Hal ini ditandai dengan sedikitnya sarana (moda) angkutan umum yang beroperasi dan beberapa terminal pembantu yang tidak beroperasi semestinya. Berdasarkan hasil analisis sebelumnya bahwa terminal yang hingga saat ini beroperasi terdiri dari Terminal Utama Sijambi, Terminal Pembantu Suprpto dan Terminal Pembantu Teluk Nibung. Bila dievaluasi lebih lanjut maka salah satu penyebab kurangnya tingkat pelayanan sarana angkutan umum Kota Tanjungbalai adalah keterbatasan akses atau rute pelayanan angkutan umum yang ada sehingga masyarakat lebih memilih moda transportasi umum lainnya seperti becak bermotor yang lebih praktis dengan tarif terjangkau.

Rencana pengembangan rute/trayek angkutan umum terdiri atas pengaktifan kembali rute/trayek yang sudah ada dan penyesuaian terhadap rencana pengembangan jaringan jalan yang mendukung perencanaan pengembangan wilayah Kota Tanjungbalai.

Rencana peningkatan dan pengembangan terminal terpadu (tipe B) dan terminal pembantu (tipe C) Kota Tanjungbalai diarahkan kepada pengoperasian/pengaktifan kembali yang disertai dengan rencana pemeliharaannya.

Secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terminal tipe B, Terminal Sijambi di Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar.
2. Terminal tipe C, terdiri dari :
  - Terminal Pahlawan di Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan.
  - Terminal Suprpto di Kelurahan Tanjungbalai IV Kecamatan Tanjungbalai Utara.
  - Terminal Teluk Nibung di Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung.
  - Terminal Selat Tanjung Medan di Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur.
  - Terminal Sei Raja di Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso.

### **C. Sistem Jaringan Perkeretaapian**

Rencana pengembangan jaringan perkeretaapian ditujukan kepada pembangunan sarana dan prasarana kereta api yang dibagi dalam tiga prioritas, yaitu: upaya peningkatan sesuai dengan standar pelayanan minimal, upaya optimalisasi sumber daya perkeretaapian melalui peningkatan jalur kereta api dan stasiun kereta serta upaya peningkatan dan pengembangan. Secara spesifik, rencana peningkatan dan pengembangan jaringan perkeretaapian meliputi :

1. Jalur kereta api umum terdiri dari:
  - Jalur kereta api Tanjungbalai – Kisaran – Medan.
  - Pengaktifan kembali jalur kereta api Tanjungbalai – Pelabuhan Teluk Nibung.
2. Stasiun kereta api yang ditingkatkan dan dikembangkan berupa:
  - Stasiun kereta api besar di Kecamatan Tanjungbalai Utara.
  - stasiun kereta api barang dan orang di Kecamatan Sei Tualang Raso.
  - stasiun kereta api di Pelabuhan Teluk Nibung.
3. Peningkatan fasilitas pengoperasian kereta api
  - Meningkatkan keamanan perlintasan Kereta Api melalui pengadaan pintu perlintasan kereta api dan/ atau perbaikan serta perpotongan jalur kereta api dengan jalan dibuat tidak sebidang.
  - Mengamankan kawasan sempadan kereta api.

### **D. Rencana Angkutan Sungai dan Penyeberangan**

Untuk rencana jaringan angkutan sungai dan angkutan penyeberangan dapat diarahkan pada pengembangan jalur alur angkutan umum dan dermaga pada angkutan sungai, meliputi :

1. Alur pelayaran dengan Sungai Asahan - Pelabuhan Teluk Nibung, dan Sungai Silau - Pelabuhan Teluk Nibung.

2. Alur pelayaran rute Sei Kepayang (Kabupaten Asahan) – Indra Sakti (Kota Tanjungbalai) dan Sei Merbau (Kota Tanjungbalai) – Sei Kepayang (Kabupaten Asahan).
1. Dermaga sungai ditetapkan di Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kelurahan Indra Sakti, Kelurahan Tanjungbalai III, dan Kelurahan Selat Tanjung Medan.

Berdasarkan analisis Renstra Dishubkominfo terhadap Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dapat disimpulkan permasalahan pelayanan di Dishubkominfo Kota Tanjungbalai sekaligus uraian faktor-faktor yang menjadi penghambat ataupun pendorong bagi pencapaian sasaran yakni seperti yang tertuang pada Tabel 3.5 berikut ini:

**Tabel 3.5**  
**Permasalahan Pelayanan Dishub Kota Tanjungbalai Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**  
**Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Permasalahan Pelayanan Dishubkominfo Kota Tanjungbalai	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan fungsi pusat pelayanan kota</li> <li>2. Pengembangan sarana dan prasarana kota</li> <li>3. penetapan dan pengelolaan kawasan lindung</li> <li>4. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau minimal 30 % dari luas wilayah kota</li> <li>5. pengembangan kawasan budidaya</li> <li>6. Penataan dan pengelolaan ruang untuk sektif informal</li> <li>7. Penetapan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya, dan hankam</li> <li>8. Pengembangan dan peningkatan kawasan industri</li> <li>9. Pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana</li> <li>10. Pengembangan wilayah beserta sarana dan prasarana umum lainnya bernuansa religius</li> <li>11. Peningkatan fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara</li> </ol>	Sebagian dokumen perencanaan transportasi belum disusun sesuai tuntutan perencanaan makro Kota	Keterbatasan anggaran untuk melakukan kajian terhadap perencanaan transportasi	Adanya peraturan – peraturan yang mengatur dalam perencanaan transportasi nasional

### 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan terkait tugas pokok fungsi Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai dan identifikasi permasalahan terkait visi, misi dan program kepala daerah terpilih telah ditetapkan isu-isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan oleh Dinas Perhubungan dan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yakni:

1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur Dinas Perhubungan sesuai kompetensi dan kebutuhan dalam mendukung Tata Kelola dan Pemerintahan yang Baik (Good Governance);
2. Pelayanan dan kenyamanan dan keselamatan dibidang ASDP;
3. Peningkatan pengawasan, pengelolaan dan pelayanan keselamatan berlalu lintas di jalan raya ;
4. Memudahkan pelayanan keselamatan,keamanan, dan kenyamanan pengguna jalan;

## **BAB IV**

### **VISI, MISI TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1 Visi dan Misi Dinas**

Perumusan visi dan misi jangka menengah SKPD merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra Dinas sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai, berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini. Pernyataan visi haruslah realistis, artinya bahwa visi harus didasarkan pada realita dan bukanlah buah pikiran yang berandai-andai agar dapat menjadi suatu komitmen yang bisa diraih. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan dapat mengatasi kesenjangan yang terjadi.

Visi Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai Tahun 2016 – 2021 adalah “ **Dinas Perhubungan yang melayani dan Memudahkan Mobilisasi** “. Agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda bagi semua pihak yang berkepentingan dengan Renstra, maka perlu dijelaskan makna dari kalimat visi tersebut diatas, sebagai berikut :

**Melayani mobilitas**, diindikasikan oleh penyelenggara transportasi yang aman, cepat, selamat, nyaman, terpelihara, mencukupi kebutuhan, serta ramah lingkungan dan menjangkau seluruh wilayah Kota Tanjungbalai;

Transportasi mempunyai dua fungsi utama yaitu mobilitas dan aksesibilitas. Fungsi mobilitas dilihat dari pembangunan dapat mempercepat proses pembangunan, sedangkan fungsi aksesibilitas dalam pembangunan terwujud dalam hal pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan kesenjangan sosial ekonomi. Permintaan Transportasi merupakan turunan dari kebutuhan aktivitas sosial ekonomi.

Dengan pengertian fungsi tersebut, Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai ingin menjadi pelayan yang memudahkan masyarakat untuk memudahkan mobilisasi pengguna angkutan dan distribusi barang/jasa dan memudahkan komunikasi di dalam wilayah Kota Tanjungbalai.

Berdasarkan uraian dan panduan di atas maka rumusan **Misi** Dinas Perhubungan Tahun 2016 sampai Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Meningkatkan sistem pelayanan transportasi yang aman, cepat, selamat, nyaman, terpelihara, mencukupi kebutuhan, serta ramah lingkungan dan menjangkau seluruh wilayah Kota Tanjungbalai.

Dalam upaya mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas, upaya yang dilakukan tidak saja bertumpu kepada penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan, namun peningkatan

kualitas SDM transportasi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, yang merupakan sistem dalam pelayanan.

2. Mewujudkan pelayanan transportasi perkotaan yang berkualitas, efisien dan berkelanjutan . Dalam upaya menurunkan tingkat kemacetan lalu lintas dan polusi udara di perkotaan peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa transportasi dititik beratkan kepada kebijakan dan akan diarahkan pada keterpaduan penanganan prasarana dan sarana serta penerapan skema manajemen lalu lintas (*Traffic Management*)

## **2.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan**

### **2.2.1. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan tidak lain adalah pernyataan-pernyataan untuk mencapai visi, misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Berdasarkan pernyataan misi diatas maka tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan adalah:

1. Mewujudkan keamanan dan keselamatan bertransportasi
2. Mewujudkan pelayanan transportasi yang berkualitas

### **2.2.2. Sasaran**

Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai adalah terciptanya pelayanan transportasi yang aman, cepat, selamat, nyaman, terpelihara, mencukupi kebutuhan, serta ramah lingkungan dan menjangkau seluruh wilayah Kota Tanjungbalai dalam satu kesatuan jaringan pelayanan transportasi. Sasaran pembangunan perhubungan tahun 2016- 2021 adalah:

1. Meningkatnya keselamatan berlalu lintas di jalan raya
2. Meningkatnya pelayanan angkutan jalan
3. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana transportasi

## **1.3 Strategi dan Kebijakan Dinas**

Untuk terarahnya pelaksanaan kegiatan operasional dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sebagai implementasi dan penjabaran Visi dan Misi, maka harus melakukan pemanfaatan sumber daya yang ada secara maksimal serta menetapkan kesatuan langkah dalam mengantisipasi perubahan dan perkembangan yang akan terjadi.

Untuk dapat merumuskan dan menetapkan strategi itu perlu menganalisis lingkungan internal dan external, pengenalan, pengukuran dan pendalaman secara kritis dan objektif terhadap

faktor-faktor strategis dari kondisi internal Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai pada periode Tahun 2016 sampai 2021 termasuk perkiraan kemungkinan perubahan dan perkembangan yang akan terjadi.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang dirumuskan harus dapat mengaitkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional, memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan bersifat operasional, mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangan dan melanggar ketentuan umum.

Dan untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi serta mencapai tujuan dan sasaran strategi pokok yang dilakukan untuk membangun perhubungan adalah:

#### **4.3.1. Strategi Peningkatan Penyelenggaraan Perhubungan**

Strategi pokok ini diarahkan untuk penataan penyelenggaraan perhubungan dan penataan sistem transportasi lokal Kota Tanjungbalai sejalan dengan dinamika perubahan lingkungan strategi melalui peningkatan profesionalitas SDM, optimalisasi pelayanan uji kendaraan bermotor secara berkala dalam rangka menjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas, pemuthiran database transportasi, pembinaan manajemen penyedia jasa angkutan, upaya aksi tertib lalu lintas dan perparkiran, manajemen rekayasa, andalalin, dan penyusunan kajian teknis rencana umum sistem transportasi sebagai bahan acuan kebijakan dan pembangunan perhubungan.

#### **4.3.2. Strategi Pembangunan Perhubungan**

Strategi pembangunan perhubungan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan termasuk keselamatan dan keamanan dalam kerangka penyediaan aksesibilitas masyarakat, strategi penanganan keselamatan melalui terciptanya pelayanan transportasi yang aman, cepat, selamat, nyaman, terpelihara, mencukupi kebutuhan, serta ramah lingkungan dan menjangkau seluruh wilayah Kota Tanjungbalai dalam satu kesatuan jaringan pelayanan transportasi.

Strategi pembangunan perhubungan menurut bidang sebagai berikut:

##### **1. Bidang Sarana dan Prasarana**

Strategi pembangunan sarana dan prasarana perhubungan diarahkan untuk melakukan penataan dan peningkatan penyelenggaraan perhubungan dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan pemerintah melalui kegiatan pembangunan

rehabilitasi dan pembangunan prasarana perhubungan lainnya meliputi Pembangunan shelter, selain itu penataan parkir di wilayah kota.

## 2. Bidang Lalu Lintas

Strategi pembangunan lalu lintas diarahkan untuk melakukan penataan dan penyelenggaraan tertib lalu lintas melalui pembangunan sistem pengendalian dan operasi, penyediaan fasilitas keselamatan lalu lintas dalam rangka mewujudkan keselamatan dan keamanan lalu lintas, selain itu pemuthiran database lalu lintas dalam rangka mengantisipasi perubahan lingkungan strategis dan kegiatan pengkajian teknis rencana umum transportasi.

## 3. Bidang Angkutan

Strategi pembangunan angkutan diarahkan untuk melakukan penataan dan penyelenggaraan pembinaan jasa penyedia angkutan melalui kegiatan penyelenggaraan ijin trayek dan ijin usaha dalam rangka pengendalian ketersediaan angkutan, penyelenggaraan penyuluhan dalam kerangka peningkatan manajemen penyedia jasa angkutan dan kegiatan pemuthiran database angkutan dalam rangka mengantisipasi perubahan lingkungan strategis.

### 4.4. Kebijakan

#### 4.4.1 Kebijakan Umum

Kebijakan umum dalam penyelenggaraan dan pembangunan perhubungan meliputi hal sebagai berikut:

1. Mendukung kelancaran pergerakan penumpang dan distribusi barang /jasa dalam kerangka pengembangan konektivitas dalam maupun luar wilayah;
2. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jasa transportasi
3. Meningkatkan kualitas SDM transportasi guna mewujudkan penyelenggaraan perhubungan yang efektif dan efisien
4. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur komunikasi dalam kerangka meningkatkan distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan

#### 4.4.2 Arah Kebijakan

1. Bidang Sarana dan Prasarana
  - a. Meningkatkan kondisi pelayanan prasarana pusat simpul transportasi melalui :
    - ✓ Rehabilitasi terminal berdasarkan struktur rencana ruang wilayah;
    - ✓ Manajemen operasional terminal
    - ✓ Pembangunan dermaga ASDP

- b. Meningkatkan prasarana perhubungan melalui:
  - ✓ Pembangunan shelter
  - ✓ penataan parkir di inti Kota
  - ✓ meningkatkan keselamatan lalu lintas melalui pengujian kelayakan sarana perhubungan.
  
- 2. Bidang Lalu Lintas jalan
  - a. Meningkatkan keselamatan lalu lintas jalan secara komprehensif dari berbagai aspek (pencegahan, pembinaan, penegakan hukum serta penanganan lokasi rawan kecelakaan)
  - b. Meningkatkan kelancaran pelayanan transportasi secara terpadu
    - ✓ Manajemen dan rekayasa lalu lintas
    - ✓ Pemasangan fasilitas keselamatan jalan
    - ✓ Penegakan hukum dibidang LLAJ dan disiplin berlalu lintas
  
- 3. Bidang Angkutan Jalan dan ASDP
  - a. Meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan jalan dan ASDP melalui:
    - ✓ Penataan Jaringan Trayek
    - ✓ Melakukan kajian angkutan sungai
    - ✓ Penataan sistem jaringan dan terminal dan Pelabuhan
    - ✓ Peningkatan peran penyedia jasa (operator) dalam penataan manajemen angkutan handal, efisien dan efektif

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1.	1. Mewujudkan keamanan dan keselamatan bertransfortasi	- Meningkatnya keselamatan berlalu lintas di jalan raya	-Rasio angka kecelakaan lalu lintas	60%	70%	80%	90%	100%
			-Rasio kendaraan yang lulus uji	60%	70%	80%	90%	100%
	2. Mewujudkan pelayanan transfortasi yang berkualitas	- Meningkatnya pelayanan angkutan jalan	-Tingkat pelayanan Jalan	0,80 (Tingkat pelayanan D)	0,70 (Tingkat pelayanan C)	0,50 (Tingkat pelayanan C)	0,40 (Tingkat pelayanan B)	0,30 (Tingkat pelayanan B)
			-Jumlah rawan kemacetan	7 Titik	6 Titik	5 Titik	4 Titik	3 Titik
		- Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana transfortasi	- Kapasitas angkutan umum	0,50	0,50	0,60	0,60	0,75



## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Pada bab ini disusun langkah – langkah rencana strategis yang lebih operasional sebagai tindak lanjut dari pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, dan kebijakan Dinas Perhubungan untuk kurun waktu 2016 – 2021. Langkah – langkah strategis tersebut meliputi program, kegiatan, inikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari program tertuang dalam RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2016 – 2021. Keterkaitan antara kebijakan dengan program disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 5.1 Kebijakan dan Program**

No.	Kebijakan	Program
1.	Mendukung kelancaran pergerakan penumpang dan distribusi barang/jasa dalam kerangka pengembangan konektivitas dalam maupun luar wilayah	1. Pembangunan sarana dan Prasarana perhubungan 2. Rehabilitasi terminal /pelabuhan
2.	Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jasa transportasi	1. Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 2. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas 3. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan 4. Peningkatan pelayanan angkutan
3.	Meningkatkan kualitas SDM transportasi dan komunikasi guna mewujudkan penyelenggaraan perhubungan dan penyelenggaraan komunikasi yang efektif dan efisien	1. Peningkatan disiplin aparatur 2. Fasilitas peningkatan SDM bidang perhubungan

#### **5.1 Rencana Program dan Kegiatan**

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka berdasarkan kategori Fungsi, Perhubungan memiliki program dan kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 5.2 Rencana Program dan Kegiatan**

No.	Program	Kegiatan
1.	Program Pelayanan Adminstarsi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional 4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan

		<p>9. Penyediaan Makan dan Minum</p> <p>10. Rapat - Rapat koordinasi dan KonsultasiKeluara Daerah</p>
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<p>1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional</p> <p>2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</p> <p>3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</p> <p>4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</p> <p>5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional</p> <p>6. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor</p> <p>7. Pengadaan Meubeler</p>
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	<p>1. Pengadaan Pakaian Dinas Dan Perlengkapannya</p> <p>2. Pengadaan pakaian Korpri</p>
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<p>1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undang</p> <p>2. Pendidikan dan Pelatihan</p>
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	<p>1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD</p> <p>2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun</p> <p>3. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD</p> <p>4. Penyusunan dan Pengelolaan Bidang Program</p>
6.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	<p>1. Rehabilitasi /Pemeliharaan Terminal Pelabuhan</p> <p>2. Rehabilitasi /Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas</p> <p>3. Rehabilitasi ATCS</p> <p>4. Rehabilitas /Pemeliharaan Mobil uji Keliling</p>
7.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	<p>1. Kegiatan Pengendalian disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya</p> <p>2. Kegiatan Penciptaan disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan dilingkungan Terminal</p> <p>3. Koordinas dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan</p> <p>4. Penyusunan laporan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di inti Kota Tanjungbalai</p> <p>5. Penyusunan Survey Volume Lalu lintas di Kota Tanjungbalai</p> <p>6. Pembuatan brosur pendidikan lalu lintas ke sekolah</p> <p>7. Penyusunan Sistem Jaringan Trayek</p> <p>8. Kajian Optimalisasi Terminal Sijambi</p> <p>9. Kajian Lokasi Dermaga orang/barang</p> <p>10. Kajian Penataan Parkir Kendaraan di Ruas Jalan</p> <p>11. Memberikan Penyuluhan terhadap Perusahaan Pelayaran tentang Keselamatan Pelayaran</p> <p>12. Mengikuti Lomba Tertib Lalu Lintas</p>

		13. Jaringan transportasi jalan 14. Masterplan transportasi angkutan sungai 15. Kajian pedestrian 16. Kajian penataan pola penyeberangan angkutan barang 17. Pengadaan jembatan timbang 18. Zona selamat sekolah (ZOSS) 19. Mengikuti awak angkutan teladan 20. Mengikuti outbond 21. Pengumpulan dan analisis database pelayanan angkutan 22. Kajian ATCS 23. Sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan 24. Forum lalu lintas
8.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	1. Pengadaan Rambu - Rambu Lalu Lintas
9.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	1. Pembangunan Halte bus, taxi gudang terminal
10.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1. Pembuatan Dermaga kapal bagi kapal-kapal dibawah 7 GT
11.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	2. Pengadaan Perlengkapan Pengujian Kendaraan Bermotor 3. Pengadaan alat uji kendaraan bermotor portable(keliling)
12.	Sistem Informasi Manajemen Transportasi	1. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen LLAJ 2. Pembuatan website dinas perhubungan 3. Maintenance website dinas perhubungan
13.	Program Penataan Peraturan Perundang – Undangan	4. Penyusunan Study Akademik Ranperda

## 7.2 Indikator Kinerja

*Tabel 5.3 Rencana Program dan Kegiatan*

No.	Program	Indikator	Target Akhir
1.	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Presentase pendukung upaya pelayanan pemerintahan	100%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peresentase upaya peningkatan kinerja aparatur	100%
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase cakupan ketersediaan tenaga Profesional pelayanan	100%
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peresentase cakupan upaya peningkatan aparatur yang profesional	100%
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peresentase upaya peningkatan kinerja pemerintahan yang baik	100%
6.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase cakupan kendalan prasarana dan fasilitas perhubungan	100%

7.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Efektivitas pelayanan angkutan	100%
8.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase upaya perwujudan ketertiban dan keselamatan lalu lintas	100%
9.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase upaya pelayanan kelaikan keselamatan kendaraan	100%
10.	Program Penataan Peraturan Perundang – Undangan	Persentase ketersediaan dokumen peraturan dibidang perhubungan	100%

**Tabel 5.4 Indikator Kinerja Sasaran Perhubungan**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir
1.	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan	100%
2.	Meningkatnya keselamatan berlalu lintas	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor	1 unit
		Jumlah izin trayek	7 Trayek
		Jumlah ijin KIR	7000 Kendaraan
3.	Meningkatnya pelayanan angkutan jalan	Jumlah daerah rawan kemacetan	2 Titik
4.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana transportasi	Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ yang terpelihara	100%
		Persentase pemberian ijin angkutan sungai	100%
		Persentase pengawasan dan pengoperasian angkutan sungai	100%

### 7.3 Kelompok Sasaran

#### 7.3.1 Bidang Perhubungan

Sasaran 1 :

Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi sesuai standar pelayanan minimal

- Meningkatkan jumlah fasilitas perlengkapan jalan
- Memenuhi standart keselamatan transportasi
- Meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor

Sasaran 2 :

Meningkat pelayanan regulasi dibidang transportasi

- Meningkatkan jumlah ijin trayek yang diselesaikan

- Meningkatkan jumlah pengujian kendaran bermotor

Sasaran 3 :

Meningkatnya kualitas SDM yang berkompeten dibidang transportasi

- Meningkatkan presentase cakupan pegawai yang memenuhi kualifikasi teknis tertentu seperti (SDM terminal, Andalalin, Pengujian Kendaraan Bermotor,dll

Sasaran 4 :

Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi ketertinggalan ketersediaan infrastruktur transportasi wilayah

- Meningkatkan jumlah halte dan pembangunan dermaga pelabuhan
- Meningkatkan jumlah halte dan terminal yang direhabilitasi

#### **7.4 Pendanaan Indikatif**

Pendanaan indikatif dalam rangka pembiayaan program – program perhubungan dapat dilihat pada tabel 5.5



Tabel 5.5 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan(juta)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan(juta)											Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
							2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra SKPD			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
Membangun dan meningkatkan pelayanan prima	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja	Meningkatnya SDM dan pelaporan kinerja pada dinas perhubungan		Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	362.312	100%	557.882	100%	588.000	100%	624.000	100%	678.000	100%	734.000	100%	805.500		
				- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat		12 bln	4.500	12 bln	5.000	12 bln	6.000	12 bln	6.500	12 bln	7.000	12 bln	8.000	Dishub	Tanjungbalai
				- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 bln	145.100	12 bln	160.000	12 bln	170.000	12 bln	175.000	12 bln	180.000	12 bln	190.000	Dishub	Tanjungbalai
				- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional		12 unit	75.000	15 unit	80.000	18 unit	80.000	21 unit	85.000	24 unit	90.000	27 unit	95.000	Dishub	Tanjungbalai
				- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja		28 unit	17.500	28 unit	18.000	28 unit	25.000	30 unit	30.000	30 unit	35.000	40 unit	40.000	Dishub	Tanjungbalai
				- Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor		12 bln	19.000	12 bln	19.500	12 bln	20.000	12 bln	25.000	12 bln	30.000	12 bln	35.000	Dishub	Tanjungbalai
				- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		12 bln	38.732	12 bln	40.000	12 bln	40.000	12 bln	45.000	12 bln	50.000	12 bln	55.000	Dishub	Tanjungbalai
				- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor		12 bln	20.000	12 bln	25.000	12 bln	27.000	12 bln	30.000	12 bln	35.000	12 bln	40.000	Dishub	Tanjungbalai

				Bangunan Kantor	Tersedianya bahan		12 bln	5.250	12 bln	5.500	12 bln	6.000	12 bln	6.500	12 bln	7.000	12 bln	7.500	Dishub	Tanjung gbalai
				- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan		12 bln	15.000	12 bln	15.000	12 bln	20.000	12 bln	25.000	12 bln	30.000	12 bln	35.000	Dishub	Tanjung gbalai
				- Penyediaan Makan dan Minum	Tersedianya makanan dan minuman		12 bln	217.800	12 bln	220.000	12 bln	230.000	12 bln	250.000	12 bln	270.000	12 bln	300.000	Dishub	Tanjung gbalai
				- Rapat - Rapat koordinasi dan KonsultasiKeluar Daerah	Tersedianya rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah															
				<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur</b>	<b>1.086.107</b>	<b>100%</b>	<b>561.620</b>	<b>100%</b>	<b>1.245.500</b>	<b>100%</b>	<b>820.000</b>	<b>100%</b>	<b>995.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.050.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.175.000</b>		
				- Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/ operasional		3 unit	59.940	4 unit	600.000	4 unit	100.000	5 unit	200.000	5 unit	200.000	5 unit	200.000	Dishub	Tanjung gbalai
				- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor		8 unit	40.000	8 unit	40.000	9 unit	50.000	9 unit	55.000	9 unit	60.000	9 unit	70.000	Dishub	Tanjung gbalai
				- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor		10 unit	50.000	20 unit	180.000	20 unit	180.000	20 unit	200.000	20 unit	220.000	20 unit	250.000	Dishub	Tanjung gbalai
				- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya bangunan gedung kantor		1 unit	245.680	1 unit	180.000	1 unit	200.000	1 unit	250.000	1 unit	250.000	1 unit	300.000	Dishub	Tanjung gbalai
				- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional		12 unit	166.000	18 unit	180.000	18 unit	200.000	18 unit	200.000	24 unit	220.000	27 unit	250.000	Dishub	Tanjung gbalai
				- Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor		-	0	12 bln	15.500	12 bln	20.000	12 bln	20.000	12 bln	25.000	12 bln	30.000	Dishub	Tanjung gbalai
				- Pengadaan Meubeler	Tersedianya Meubeler		-	0	12 bln	50.000	12 bln	70.000	12 bln	70.000	12 bln	75.000	12 bln	75.000	Dishub	Tanjung gbalai
				- Pengadaan kapal patroli pengawasan ASDP	Tersedianya kapal patroli pengawasan ASDP		-	0	-	0	1 unit	500.000	-	0	-	0	-	0	Dishub	Tanjung gbalai
				<b>Program Peningkatan</b>	<b>Cakupan ketersediaan</b>	<b>100.000</b>	<b>100%</b>	<b>105.000</b>	<b>100%</b>	<b>140.000</b>	<b>100%</b>	<b>610.000</b>	<b>100%</b>	<b>120.000</b>	<b>100%</b>	<b>120.000</b>	<b>100%</b>	<b>160.000</b>		

				<b>Disiplin Aparatur</b>	<b>pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>															
				- Pengadaan Pakaian Dinas Dan Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas PNS beserta perlengkapannya		50 stel	105.000	50 stel	110.000	50 stel	110.000	50 stel	120.000	50 stel	120.000	50 stel	125.000	Dishub	Tanjungbalai
				- Pengadaan pakaian korpri	Tersedianya pakaian korpri PNS		-	0	50 stel	30.000	-	0	-	0	-	0	50 stel	35.000	Dishub	Tanjungbalai
				-Pengadaan alat-alat persenjataan/keamanan	Tersedianya alat-alat persenjataan/keamanan		-	0	-	0	3 unit	500.000	-	0	-	0	-	0	Dishub	Tanjungbalai
				<b>Program Sistem Informasi Manajemen Transportasi</b>	<b>Cakupan ketersediaan sistem informasi manajemen transportasi</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>		
				- Pengembangan Sistem informasi manajemen LLAJ	Terlaksananya pengembangan Sistem informasi manajemen LLAJ		-	0	-	0	1 Dokumen	150.000	-	0	-	0	-	0	Dishub	Tanjungbalai
				-Pembuatan website dinas perhubungan	Tersedianya website dinas perhubungan		-	0	1 dok	100.000	-	0	-	0	-	0	-	0	Dishub	Tanjungbalai
				-Maintanance website dinas perhubungan	Terlaksananya Maintanance website dinas perhubungan		-	0	-	0	1 dok	50.000	Dishub	Tanjungbalai						
				<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Sumber daya manusia perhubungan</b>	<b>20.000</b>	<b>100%</b>	<b>70.000</b>	<b>100%</b>	<b>100.000</b>										
				- Bimbingan Teknis dan Pelatihan Peraturan Perundang – Undangan	Tersedianya bimbingan teknis dan pelatihan Peraturan perundang-undangan		4 kali	70.000	4 kali	100.000	Dishub	Tanjungbalai								
				<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pelaporan keuangan dan pelaporan</b>	<b>50.000</b>	<b>100%</b>	<b>75.954,3</b>	<b>100%</b>	<b>60.000</b>	<b>100%</b>	<b>60.000</b>	<b>100%</b>	<b>63.000</b>	<b>100%</b>	<b>63.000</b>	<b>100%</b>	<b>105.000</b>		

					<i>keuangan dan pelaporan kinerja SKPD</i>															
				- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya buku lakip		10 buku	5.000	10 buku	5.000	10 buku	5.000	10 buku	8.000	10 buku	8.000	10 buku	10.000	Dishub	Tanjungbalai
				- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya buku laporan realisasi keuangan akhir tahun dan asset		10 buku	15.000	15 buku	20.000	15 buku	20.000	15 buku	20.000	15 buku	20.000	15 buku	20.000	Dishub	Tanjungbalai
				• Laporan Keuangan																
				• Manajemen Asset																
				- Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	Tersedianya laporan Renstra dan Renja SKPD		20 buku	35.954,3	10 buku	10.000	10 buku	10.000	10 buku	10.000	10 buku	10.000	20 buku	50.000	Dishub	Tanjungbalai
				- Penyusunan dan Pengelolaan Bidang Program	Tersedianya laporan di bidang program		1 dokumen	20.000	1 dokumen	25.000	1 dokumen	25.000	1 dokumen	25.000	1 dokumen	25.000	1 dokumen	25.000	Dishub	Tanjungbalai
				<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>Cakupan ketersediaan penataan peraturan perundang-undangan</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>58.400</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>60.000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>70.000</b>		
				- Penyusunan Study Akademik Ranperda	Tersusunnya study akademik Ranperda		1 dokumen	58.400	-	0	-	0	1 dokumen	60.000	-	0	1 dokumen	70.000	Dishub	Tanjungbalai
<b>Mewujudkan pelayanan transportasi yang berkualitas</b>	<b>Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi</b>	<b>Kapasitas angkutan umum</b>		<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b>	<b>Jumlah terminal bus/angkutan penumpang yang terpelihara</b>	<b>384.847</b>	<b>100%</b>	<b>454.600</b>	<b>100%</b>	<b>10.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.300.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.430.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.430.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.450.000</b>		
				- Rehabilitasi /Pemeliharaan Terminal Pelabuhan	Terpeliharanya fasilitas di terminal/ pelabuhan		3 unit	240.000	22871 m2	10.200.000	22871 m2	1.000.000	Dishub	Tanjungbalai						
				- Rehabilitasi /Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	Terpeliharanya rambu-rambu lalu lintas		3 jenis	214.600	4 jenis	300.000	4 jenis	300.000	4 jenis	330.000	4 jenis	330.000	4 jenis	350.000	Dishub	Tanjungbalai

				- Rehabilitasi ATCS	Terpeliharanya ATCS		-	0	-	0	-	0	1 set	100.000	1 set	100.000	1 set	100.000	Dishub	Tanjungbalai
				- Rehabilitasi/Pemeliharaan mobil uji keliling	Terpeliharanya mobil uji keliling		-	0	-	0	-	0	1 set	30.000	1 set	30.000	1 set	30.000	Dishub	Tanjungbalai
	<b>Meningkatnya pelayanan angkutan jalan</b>	<b>-Tingkat pelayanan jalan -jumlah rawan kemacetan</b>		<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>	<b>Jumlah arus penumpang angkutan umum</b>	<b>1.622.224</b>	<b>100%</b>	<b>1.420.726</b>	<b>100%</b>	<b>1.921.656</b>	<b>100%</b>	<b>2.026.656</b>	<b>100%</b>	<b>2.181.656</b>	<b>100%</b>	<b>2.181.656</b>	<b>100%</b>	<b>1.926.656</b>		
				- Kegiatan Pengendalian disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Terkendalinya disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya		12 bln	1.186.656	12 bln	1.306.656	12 bln	1.306.656	<b>12 bln</b>	1.306.656	12 bln	1.306.656	12 bln	1.306.656	Dishub	Tanjungbalai
				- Kegiatan Penciptaan disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan dilingkungan Terminal	Terciptanya disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal		12 orang	153.600	14 orang	170.000	14 orang	170.000	<b>16 orang</b>	180.000	16 orang	190.000	16 orang	200.000	Dishub	Tanjungbalai
				- Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	Terkordinirnya dan meningkatnya pelayanan angkutan		12 bln	80.470	12 bln	90.000	12 bln	90.000	<b>12 bln</b>	95.000	12 bln	100.000	12 bln	100.000	Dishub	Tanjungbalai
				- Penyusunan laporan manajemen dan rekayasa lalu lintas diinti kota tanjungbalai	Tersusunnya laporan manajemen dan rekayasa lalu lintas diinti kota tanjungbalai		-	0	1 dokumen	200.000	-	0	-	0	1 dokumen	200.000	-	0	Dishub	Tanjungbalai
				- Penyusunan survey volume lalu lintas di inti kota tanjungbalai	Tersusunnya survey volume lalu lintas diinti kota tanjungbalai		-	0	1 dokumen	50.000	1 dokumen	50.000	<b>1 dokumen</b>	60.000	-	0	-	0	Dishub	Tanjungbalai
				- Pembuatan brosur pendidikan lalu lintas ke sekolah	Tersedianya brosur pendidikan lalu lintas ke sekolah		-	0	2 exemplar	55.000	2 exemplar	60.000	<b>2 exemplar</b>	60.000	2 exemplar	60.000	2 exemplar	60.000	Dishub	Tanjungbalai
				- Penyusunan	Tersusunnya sistem		-	0	-	0	-	0	<b>1</b>	80.000	-	0	-	0	Dishub	Tanjungbalai



				-Zona selamat sekolah (ZOSS)	Tersedianya Zona selamat sekolah (ZOSS)		-	0	-	0	1 unit	50.00 0	-	0	-	0	-	0	Dishub	Tanjung gabalai
				-Mengikuti awak angkutan teladan	Terlaksananya awak angkutan teladan		-	0	-	0	1 tahun	100.0 00	1 tahun	100.0 00	1 tahun	100.0 00	1 tahun	100.00 0	Dishub	Tanjung gabalai
				-Mengikuti outbond	Terlaksananya outbond		-	0	-	0	-	0	1 tahun	100.0 00	-	0	-	0	Dishub	Tanjung gabalai
				-Pengumpulan dan analisis database pelayanan angkutan	Tersusunnya analisis database pelayanan angkutan		-	0	-	0	-	0	-	0	1 dok	200.0 00	-	0	Dishub	Tanjung gabalai
				-Kajian ATCS	Tersusunnya kajian ATCS		-	0	-	0	-	200.0 00	-	0	-	0	-	0	Dishub	Tanjung gabalai
				-Sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan	Terlaksananya Sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan		-	0	-	0	1 keg	50.00 0	1 keg	50.00 0	1 keg	50.00 0	1 keg	50.000	Dishub	Tanjung gabalai
				-Forum lalu lintas	Terlaksananya forum lalu lintas		-	0	-	0	1 keg	100.0 00	1 keg	100.0 00	1 keg	100.0 00	1 keg	100.00 0	Dishub	Tanjung gabalai
<b>Mewujudkan keamanan dan keselamatan bertransportasi</b>	<b>Meningkatkan keselamatan berlalu lintas di jalan raya</b>	<b>Rasio angka kecelakaan lalu lintas</b>		<b>Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas</b>	<b>Cakupan pemasangan rambu-rambu lalu lintas</b>	<b>454.808</b>	<b>100%</b>	<b>588.01 2,85</b>	<b>100%</b>	<b>3.740. 000</b>	<b>100%</b>	<b>3.740. 000</b>	<b>100%</b>	<b>1.370. 000</b>	<b>100%</b>	<b>1.550. 000</b>	<b>100%</b>	<b>1.570. 000</b>		
				- Pengadaan Rambu - Rambu Lalu Lintas																
				1. Pengadaan marka jalan	Tersedianya marka jalan		-	0	952 m2	200.0 00	952 m2	200.0 00	952 m2	200.0 00	952 m2	220.0 00	952 m2	250.00 0	Dishub	Tanjung gabalai
				2. Pengadaan rambu tiang tinggi	Tersedianya rambu tiang tinggi		15 unit	137.97 2	25 unit	200.0 00	25 unit	200.0 00	25 unit	200.0 00	25 unit	220.0 00	25 unit	250.00 0	Dishub	Tanjung gabalai
				3. Pengadaan rambu tiang pendek	Tersedianya rambu tiang pendek		56 unit	49.972	222 unit	200.0 00	222 unit	200.0 00	222 unit	200.0 00	222 unit	220.0 00	222 unit	250.00 0	Dishub	Tanjung gabalai
				4. Pengadaan warning light	Tersedianya warning light		3 unit	156.97 2	3 unit	170.0 000	3 unit	170.0 00	3 unit	170.0 000	3 unit	170.0 00	3 unit	170.00 0	Dishub	Tanjung gabalai
				5. Pemasangan APILL	Tersedianya APILL		-	0	-	0	-	0	1 unit	200.0 000	1 unit	200.0 00	-	0	Dishub	Tanjung gabalai
				6. Pengadaan	Tersedianya kunci		-	0	3 unit	100.0	3 unit	100.0	-	0	3 unit	120.0	-	0	Dishub	Tanjung

				kunci roda portable	roda portable				00		00				00					gblai
				7. Pengadaan Portal	Tersedianya portal	-	0	1 unit	70.000	1 unit	70.000	-	0	-	0	1 unit	100.000	Dishub	Tanjung gblai	
				8. Pengadaan road barrier	Tersedianya road barrier	30 unit	95.624,85	64 unit	200.000	64 unit	200.000	64 unit	200.000	-	0	-	0	Dishub	Tanjung gblai	
				9. Pengadaan ATCS	Tersedianya ATCS	-	0	-	0	1 set	500.000	-	0	-	0	-	0	Dishub	Tanjung gblai	
				10. Pengadaan Cermin Tikungan	Tersedianya cermin tikungan	-	0	83 unit	50.000	83 unit	50.000	-	0	-	0	83 unit	50.000	Dishub	Tanjung gblai	
				11. Pengadaan dan pemasangan CCTV untuk pengawasan lalu lintas	Tersedianya pemasangan CCTV untuk pengawasan lalu lintas	-	0	1 unit	300.000	1 unit	300.000	-	0	-	0	1 unit	300.000	Dishub	Tanjung gblai	
				12. Pengadaan plang kereta api	Tersedianya plang kereta api	-	0	1 unit	2.000.000	1 unit	2.000.000	-	0	-	0	-	0	Dishub	Tanjung gblai	
				13. Pengadaan dan Pemasangan Patok Pengamanan Jalan	Tersedianya patok pengamanan jalan	100 unit	147.472	-	0	-	0	100 unit	150.000	100 unit	150.000	100 unit	150.000	Dishub	Tanjung gblai	
				14. Pembuatan papan nama jalan beserta statusnya	Tersedianya papan nama jalan beserta statusnya	-	0	83 unit	50.000	83 unit	50.000	83 unit	50.000	83 unit	50.000	83 unit	50.000	Dishub	Tanjung gblai	
				15. Pengadaan Paku marka	Tersedianya paku marka	-	0	-	0	50 unit	200.000	50 unit	200.000	50 unit	200.000	50 unit	200.000	Dishub	Tanjung gblai	
	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana transportasi	Kapasitas angkutan umum		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Cakupan ketersediaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	0	-	0	-	0	-	0	100%	1.000.000	-	0	-	0		
				- Pembuatan Dermaga kapal bagi kapal-kapal dibawah 7 GT	Tersedianya Dermaga kapal bagi kapal-kapal dibawah 7 GT			-	0	-	0	1 unit	1.000.000	-	0	-	0	Dishub	Tanjung gblai	
				Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Terpenuhinya peningkatan pelayanan publik	199.934	-	0	100%	200.000	100%	210.000	100%	210.000	100%	220.000	100%	220.000		
				- Pembangunan haltebus, taxi gudang terminal	Tersedianya halte bus, taxi gudang terminal		0	5 unit	200.000	5 unit	210.000	5 unit	210.000	5 unit	220.000	5 unit	220.000	Dishub	Tanjung gblai	

	Meningkatnya keselamatan berlalu lintas	Rasio kendaraan yang lulus uji		Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Terpenuhinya pelayanan pengujian kelaikan kendaraan bermotor	40.000	100%	30.000	100%	2.535.000	100%	2.540.000	100%	1.040.000	100%	1.040.000	100%	40.000		
				- Pengadaan Perlengkapan Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya perlengkapan pengujian kendaraan bermotor		2333 buku/set	30.000	2333 buku/set	35.000	2333 buku/set	40.000	2333 buku/set	40.000	2333 buku/set	40.000	2333 buku/set	40.000	Dishub	Tanjungbalai
				- Pengadaan alat uji kendaraan bermotor portable	Tersedianya alat uji kendaraan bermotor portable		-	0	1 unit	2.500.000	1 unit	2.500.000	1 unit	1.000.000	1 unit	1.000.000	-	0	Dishub	Tanjungbalai
				- Kalibrasi alat pengujian kendaraan bermotor	Terlaksananya Kalibrasi alat pengujian kendaraan bermotor		-	0	-	0	1 set	100.000	1 set	100.000	1 set	100.000	1 set	200.000	Dishub	Tanjungbalai

---

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA DINAS YANG MENGACU**  
**PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

---

Tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tanjungbalai 2016 – 2021 yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan sebagai berikut:

- Tujuan :
1. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat
  2. Mewujudkan kualitas penataan kawasan Kota secara terpadu dengan dukungan infrastruktur yang memadai

- Sasaran :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
  2. meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik untuk mendukung penataan Kota yang bersih, indah dan rapi yang berwawasan lingkungan

Sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tersebut, berikut ini indikator kinerja Dinas Perhubungan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh dinas dalam kurun lima tahun mendatang sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD

Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan pada tabel 6.1 berikut ini:

Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan pada tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

NO	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Program	Kondisi Kinerja Pada Tahun Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Tahun Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)	SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>PERHUBUNGAN</b>										
1	Jumlah rawan kemacetan	Peningkatan Pelayanan Angkutan	8 Titik	7 Titik	6 Titik	5 Titik	4 Titik	3 Titik	3 Titik	
2	Rasio Izin Trayek		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Rasio Jumlah Kendaraan Bermotor Yang di uji Terhadap Wajib Uji	Peningkatan Kelaikan Operasional Kendaraan Bermotor	40 %	70 %	80 %	80 %	90 %	100 %	100 %	
4	Jumlah Pelabuhan Laut	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	1 Buah	1 Buah	1 Buah	1 Buah	2 Buah	2 Buah	2 Buah	
5	Ketersediaan Halte		9 Buah	10 Buah	11 Buah	12 Buah	13 Buah	14 Buah	14 Buah	
6	Jumlah Terminal Bus/Angkutan Penumpang yang terpelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	5 Unit	
7	Cakupan Pemasangan Rambu Lalu Lintas	Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	210 Unit	410 Unit	430 Unit	450 Unit	470 Unit	490 Unit	490 Unit	
8	Cakupan Marka Jalan		1900 Meter	3900 Meter	5900 Meter	7900 Meter	9900 Meter	11900 Meter	11900 Meter	
9	Pemasangan APILL		4 Unit	-	-	5 Unit	6 Unit	-	6 Unit	

10	Pemasangan warning Light		11 Unit	14 Unit	16 Unit	18 Unit	20 Unit	22 Unit	22 Unit	
11	Sumber Daya Manusia Perhubungan	Peningkatan Kapsitas Sumber Daya Aparatur	4 Orang	6 Orang	10 Orang	13 Orang	15 Orang	17 Orang	17 Orang	

---

**BAB VII**  
**PENUTUP**

---

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai Tahun 2016 – 2021 merupakan langkah awal dalam pelaksanaan tugas sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kota Tanjungbalai. Oleh karena itu dengan adanya Rencana Strategis yang telah dirumuskan ini dapat digunakan sebagai penuntun umum dalam pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai.

Adanya Rencana Strategis ini merupakan kombinasi terbaik dari beberapa pilihan terbaik dari berbagai alternatif tindakan yang mungkin dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai sekaligus memberikan arah dan pedoman tindakan yang dilaksanakan, mengeliminir unsur ketidakpastian dan juga merupakan alat evaluasi. Dengan adanya evaluasi ini maka Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai mampu untuk menggambarkan keberhasilan yang dapat tercapai dan sekaligus juga dapat menggambarkan kegagalan dalam pelaksanaan misi Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai dalam mencapai tujuan-tujuan maupun sasaran – sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai ini disusun tidak hanya mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta langkah – langkah pencapaian tujuan dan sasaran, tetapi mencakup pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai. Keberhasilan pelaksanaan Rencana strategis ini sangat dipengaruhi oleh komitmen penuh para pelaksana tugas dilingkungan kerja Dinas Perhubungan sendiri dan juga instansi terkait lainnya melalui proses saling berkomunikasi dan berkoordinasi.

Semoga adanya Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai Tahun 2016 – 2021 ini dapat turut mendukung perwujudan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kota Tanjungbalai berdasarkan prinsipn – prinsip Pemerintah yang baik ( *Good Governance* )